

BUKU PUTIH **POLICY STATEMENT**

KEPARIWISATAAN **LABUAN BAJO FLORES** **NUSA TENGGARA TIMUR**



Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
tahun 2024

KATA PENGANTAR

Destinasi Labuan Bajo Flores dan sekitarnya, memiliki keterkaitan dengan entitas spasial, sosial budaya, ekonomi dan ekologi. Sumber daya alam dan budaya yang eksotis dengan keanekaragaman hayati tentu menjadi modalitas untuk membangun harmoni dalam tatanan ekosistem kepariwisataan yang berkelanjutan. Potensi dan kapasitas sebagai destinasi pariwisata yang semakin populer umumnya selalu dihadapkan dengan dinamika tantangan kompleks yang mengancam keberlanjutan kepariwisataan. Pertumbuhan kepariwisataan yang pesat tanpa perencanaan dan pengendalian yang matang akan mengakibatkan kerusakan ekologis yang masif, degradasi budaya, disparitas sosial, dan kesenjangan ekonomi.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dalam perspektif berpikir sistem (*system thinking*) untuk mencermati berbagai isu dan tantangan seraya berupaya mendesain strategi manajemen, tata kelola dan kepemimpinan guna mengelola kepariwisataan yang berkarakter, berkualitas, bermartabat, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Buku Putih sebagai *policy statement* ini bertujuan untuk memaparkan dan mengorkestrasi berbagai tantangan dan isu strategis, analisis situasi, formulasi rekomendasi strategi, dan skenario pengembangan kepariwisataan Labuan Bajo Flores dan sekitarnya. Buku ini diharapkan dapat menjadi peta jalan kepariwisataan jangka pendek, menengah dan panjang demi mencapai pembangunan kepariwisataan melalui 10 isu dan rekomendasi strategis yang mencakup konservasi dan keberlanjutan, tata ruang dan lanskap, pesisir dan kelautan, sosial dan budaya, keselamatan dan keamanan, sumber daya manusia dan kelembagaan, sampah dan limbah, rantai pasok, infrastruktur dan tata kelola.

Sebagai *policy statement* kepariwisataan Labuan Bajo, Flores dan sekitarnya, buku ini merupakan dokumen pernyataan kebijakan BPOLBF untuk mencermati berbagai tantangan dan isu strategis, menghasilkan rekomendasi dan menentukan langkah strategis bagi para pihak untuk memperkokoh pembangunan kepariwisataan yang semakin berkarakter, berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.

Terima kasih kepada Tim Penyusun dan para pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Buku Putih ini. Dengan diterbitkannya *policy statement* ini, diharapkan buku ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan seraya memastikan keterpaduan dukungan para pihak untuk pembangunan kepariwisataan di Labuan Bajo, Flores dan sekitarnya, agar semakin berbobot dengan tetap mengutamakan aspek pengelolaan lingkungan, pengembangan infrastruktur, pemberdayaan dan transformasi sosial budaya, serta ekonomi berkelanjutan sehingga dapat tercipta pengalaman premium dan nilai kepariwisataan holistik yang bermakna. Selamat Hari Pariwisata Dunia!

Labuan Bajo, 27 September 2024

Dr. Frans Teguh, MA.,CHE
Pelaksana Tugas
Direktur Utama BPOLBF

BUKU PUTIH / POLICY STATEMENT - KEPARIWISATAAN LABUAN BAJO FLORES - NTT- 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB 1: PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Progress DPSP Labuan Bajo	4
1.3 Mind Mapping dan Strategi Pengembangan Kepariwisata	6
BAB II: ISU STRATEGIS	9
2.1 Konservasi dan Keberlanjutan (<i>Conservation & Sustainability</i>)	9
2.2 Tata Ruang & Lanskap (<i>Spatial Plan & Landscape</i>)	10
2.3 Pesisir dan Kelautan (<i>Coastal & Marine</i>)	12
2.4 Sosial dan Budaya (<i>Society and Culture</i>)	14
2.5 Keselamatan dan Keamanan (<i>Safety & Security</i>)	15
2.6 SDM & Kelembagaan (<i>Human Resources & Institutions</i>)	16
2.7 Sampah atau Limbah (<i>Waste</i>)	17
2.8 Rantai Pasok (<i>Supply Chain</i>)	18
2.9 Infrastruktur (<i>Infrastructure</i>)	19
2.10 Tata Kelola (<i>Destination Management & Destination Governance</i>)	21
BAB III: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	23
3.1 Kesimpulan	23
3.2 Matriks Rekomendasi dan Tindak Lanjut	28
TIM PENYUSUN	50

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Labuan Bajo, Flores, dan sekitarnya memiliki potensi dan kapasitas untuk menjadi salah satu pilihan destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia. Keindahan alam seperti Taman Nasional, pulau-pulau kecil yang eksotis, kekayaan bawah laut dengan terumbu karang dan biodiversitas laut, kekayaan budaya dan kehidupan masyarakatnya merupakan manifestasi keutuhan kapasitas pengembangan destinasi yang memiliki dimensi spasial, sosial, budaya, ekonomi dan ekologi yang membutuhkan dukungan, partisipasi, dan kolaborasi para pihak.

Melihat potensi tersebut, pada tahun 2019 melalui Rapat Terbatas Kabinet Tanggal 15 Juli 2019 di Jakarta, Pemerintah Indonesia mencanangkan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di lima wilayah yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika – Lombok (Nusa Tenggara Barat), Likupang (Sulawesi Utara), dan Labuan Bajo, Flores (Nusa Tenggara Timur). Penetapan DPSP ini adalah pengerucutan dari sebelumnya pada tahun 2017, Pemerintah menetapkan pengembangan 10 Destinasi Wisata Prioritas atau yang disebut “10 Bali Baru”. Kesepuluh destinasi wisata tersebut yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika-Lombok (Nusa Tenggara Barat), Bromo- Tengger – Semeru (Jawa Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Tanjung Lesung (Banten) dan Morotai (Maluku Utara). Penetapan DPSP ini kemudian memperkuat Perpres 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk mendiversifikasi destinasi pariwisata di Indonesia serta menyebarkan pertumbuhan dan manfaat ekonomi pariwisata ke berbagai daerah. Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah berinvestasi dalam berbagai proyek peningkatan infrastruktur dan konektivitas termasuk perluasan Bandara Komodo, peningkatan jalan, serta pengembangan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai aksesibilitas, kenyamanan, pengalaman pariwisata holistik baik bagi pengunjung/wisatawan, dan reputasi destinasi pariwisata domestik dan internasional.

Namun, meski kepariwisataan membawa berbagai manfaat ekonomi bagi Labuan Bajo Flores dan sekitarnya, kinerja pertumbuhan yang pesat membawa sejumlah masalah yang mengancam keberlanjutan kawasan ini. Salah satu masalah utama adalah ancaman terhadap kelestarian ekosistem lingkungan dan sosial budaya. Peningkatan jumlah wisatawan, terutama di kawasan konservasi, seringkali berbanding lurus dengan tekanan terhadap flora dan fauna dan ekosistem lingkungan dan sosial budaya setempat. Pengunjung/wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan dan

aturan konservasi, interaksi yang tidak terkendali dengan satwa liar, serta pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan semakin berpotensi merusak ekosistem yang rapuh.

Selain itu, pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan seperti hotel, resort, dan properti komersial lainnya juga sering kali tidak disertai dengan perencanaan tata ruang dan lanskap yang memadai. Hal ini menyebabkan perubahan lanskap yang signifikan dan mengancam keindahan alami yang menjadi daya tarik utama Labuan Bajo Flores dan sekitarnya. Pengembangan yang berlebihan di area yang seharusnya dilindungi berisiko merusak keserasian visual dan karakter alami kawasan tersebut.

Kerusakan ekosistem laut juga menjadi perhatian serius. Aktivitas pariwisata seperti *snorkeling*, *diving*, dan berlayar yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan kerusakan terumbu karang, mengurangi kualitas air laut, dan mengganggu habitat laut. Peningkatan lalu lintas kapal, terutama kapal-kapal wisata ini berpotensi menambah pencemaran laut dan merusak ekosistem sensitif di sekitar Labuan Bajo. Hal ini juga berdampak pada keanekaragaman hayati laut yang menjadi aset penting bagi industri pariwisata.

Dari sisi sosial, peningkatan jumlah pengunjung/wisatawan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat lokal. Komersialisasi budaya lokal demi pariwisata dapat menghilangkan keaslian dan otentisitas budaya dan mengurangi nilai-nilai tradisional dan lokalitas. Selain itu, adanya perbedaan budaya antara pengunjung/wisatawan dan penduduk lokal berpotensi menimbulkan konflik sosial. Di sisi lain, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam industri pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya, seringkali belum memadai. Kurangnya pelatihan dan keterampilan di bidang *hospitality* menghambat kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengunjung/wisatawan.

Masalah sampah juga menjadi tantangan besar. Peningkatan aktivitas pariwisata menghasilkan volume dan jenis, terutama sampah plastik, yang belum dikelola secara optimal. Hal ini mengakibatkan pencemaran di darat dan laut, yang tidak hanya merusak keindahan alam, tetapi juga mengancam ekosistem lingkungan perairan lokal dan kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, meski kepariwisataan memiliki manfaat ekonomi, Labuan Bajo, Flores menghadapi tantangan besar terkait dengan keberlanjutan. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal serta ekonomi berkelanjutan. Pengembangan kepariwisataan berkelanjutan menjadi kunci agar kawasan ini tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang tanpa merusak nilai keindahan dan keutuhan kekayaan alam dan budaya.

1.2 Progres DPSP Labuan Bajo

Progres pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo terus menunjukkan

perkembangan yang positif. Data Bank Indonesia, hingga awal 2024 menunjukkan total investasi mencapai hampir Rp 570 miliar, termasuk kontribusi dari investor asing dan domestik. Labuan Bajo juga terus menarik minat internasional, terbukti dengan penerbangan langsung perdana dari Kuala Lumpur ke Labuan Bajo oleh AirAsia pada September 2024. Ini diharapkan dapat meningkatkan pergerakan dan jumlah wisatawan dan memperluas peluang ekonomi daerah dan lokal.

Berdasarkan data rekapitulasi Kementerian PUPR (Laporan KSPN Labuan Bajo Tahun 2022) dari berbagai program pembangunan, Pemerintah Pusat telah membangun 20 fasilitas dengan total investasi Rp.7,1 Triliun termasuk perluasan Bandara Komodo dan Kawasan Marina Waterfront Labuan Bajo. Selain pembangunan infrastruktur, DPSP Labuan Bajo juga memperkuat penerapan pariwisata berbasis komunitas, budaya, dan ekologi, serta menggelar berbagai acara besar berskala internasional seperti Pertemuan Internasional, Tour de Flores, Komodo Marathon, dan Festival untuk menarik pengunjung/wisatawan. Pengembangan SDM dan peningkatan kualitas pariwisata menjadi perhatian utama dengan rencana pendirian pendidikan vokasi seperti Politeknik Pariwisata Negeri di Manggarai Barat.

Destinasi Labuan Bajo Flores menetapkan target makro yang optimis untuk tahun 2024. Kontribusi PDRB ditargetkan mencapai Rp 1,2 triliun, peningkatan devisa sebesar Rp 8 triliun, serta penciptaan 10 ribu lapangan kerja baru. Selain itu, kunjungan wisatawan mancanegara diharapkan mencapai 500 ribu orang, sementara wisatawan nusantara ditargetkan mencapai 1 juta orang. Target ini menunjukkan komitmen kuat untuk mengembangkan Labuan Bajo Flores sebagai destinasi pariwisata unggulan.

Dalam realisasi dan target dalam RPJMN 2019-2024, perkembangan positif di berbagai sektor. Investasi pariwisata telah mencapai 10 Juta USD pada tahun 2020, melebihi target awal. Jumlah usaha pariwisata juga telah melampaui target yakni mencapai 41 usaha pada tahun 2023. Meskipun jumlah atraksi, amenitas, dan aksesibilitas pariwisata belum mencapai target, laporan realisasi menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kegiatan pemasaran untuk wisatawan mancanegara dan nusantara juga telah melampaui target, menunjukkan upaya promosi yang efektif. Selain itu, perkembangan investasi pariwisata, pengembangan rantai pasok dan kesempatan kerja serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban termasuk citra dan reputasi destinasi menjadi perhatian bersama para pihak.

Meskipun terdapat perkembangan positif, masih terdapat kesenjangan antara kondisi saat ini (2023) dan target makro 2024. Kontribusi PDRB, peningkatan devisa, dan kontribusi terhadap kesempatan kerja masih jauh dari target. Jumlah kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara, juga perlu ditingkatkan secara signifikan. Berbagai kesenjangan ini menunjukkan perlunya upaya lebih

lanjut untuk mencapai target optimistis tersebut.

Dalam rangka pencapaian target makro dan mikro tersebut, beberapa faktor kunci keberhasilan perlu diperhatikan. Pertumbuhan investasi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan, diversifikasi produk pariwisata, dan pemasaran yang efektif menjadi kunci untuk menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Labuan Bajo Flores. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat lokal juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Labuan Bajo.

Berikut adalah rincian data dan target terkait pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, khususnya dalam konteks RPJMN dan arahan Presiden:

	ASPEK	2019	2024
Makro	- Kontribusi PDRB - Peningkatan Devisa - Kontribusi terhadap Kesempatan kerja	247 Milyar Rupiah 910 Milyar Rupiah 4 Ribu Orang	1,2 Trilyun Rupiah + 614 Milyar 8 Trilyun Rupiah + 4,24 Trilyun 10 Ribu Orang + 6 Ribu
Mikro	- Indeks Daya Saing Kepariwisataan - Kunjungan Wisatawan Mancanegara - Kunjungan Wisatawan Nusantara	#70 65 Ribu 300 Ribu	#30 saat ini #32 500 Ribu saat ini Total Wisatawan & Wisata 242.500 1 juta saat ini Total Wisatawan & Wisata 242.500

Tabel 1.2.1: Target Makro DPSP Labuan Bajo. Sumber: BPOLBF, 2024.

No	Program/Kegiatan/Proyek	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Realisasi Target				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024 (Per Semester I)
1	Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di Labuan Bajo-Flores (PN)	Jumlah investasi pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Juta USD	1	3	4	8	15		10	102	32	19
		Jumlah usaha pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Usaha	10	10	15	20	25		27	104	60	41
2	Meningkatnya kualitas layanan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores	Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap layanan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00		3,00	4,00	4,00	-
3	Tersedianya produk pariwisata di Labuan Bajo-Flores (PN)	Jumlah atraksi/laya tarik pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Atraksi	2	3	5	6	8		3	7	6	4
		Jumlah amenitas pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Unit	2	3	5	6	8		3	6	6	4
		Jumlah aksesibilitas pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Objek	2	3	5	7	8		3	6	9	3
4	Meningkatnya kunjungan wisman dan wisnus ke Labuan Bajo-Flores (PN)	Jumlah Kegiatan Pemasaran Labuan Bajo-Flores untuk Segmen Wisman	Keg	-	-	1	3	5	-	-	6	5	9
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Labuan Bajo-Flores untuk Segmen Wisnus	Keg	-	-	5	6	8	-	-	9	8	8

Tabel 1.2.2: RPJMN DPSP Labuan Bajo. Sumber: BPOLBF, 2024.

Dari data di atas, terlihat bahwa Labuan Bajo memiliki target optimis untuk pengembangan pariwisata hingga 2024. Dengan investasi yang besar, peningkatan fasilitas, dan strategi pemasaran yang tepat, diharapkan Labuan Bajo Flores dapat menjadi salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Secara

keseluruhan, Labuan Bajo Flores dan Sekitarnya terus berkembang sebagai destinasi berkualitas dengan peningkatan pada indeks pariwisata yang berkelanjutan, tetapi masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek seperti keberlanjutan dan keunikan.

1.3 Mind Mapping dan Strategi Pengembangan Kepariwisata

Pengembangan kepariwisataan di kawasan Labuan Bajo, Flores dan Sekitarnya dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks yang memerlukan solusi inovatif dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah menjaga momentum keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan konservasi lingkungan. Taman Nasional Komodo dan perairan di sekitarnya sebagai ikon Labuan Bajo, Flores, menghadapi tekanan yang semakin besar akibat over kapasitas dan perubahan iklim global. Kerusakan terumbu karang yang meluas juga mengancam ekosistem laut yang vital. Pendekatan keberlanjutan dan konservasi menjadi penting untuk memastikan bahwa kepariwisataan tidak merusak lingkungan, melainkan berkontribusi pada pelestariannya.

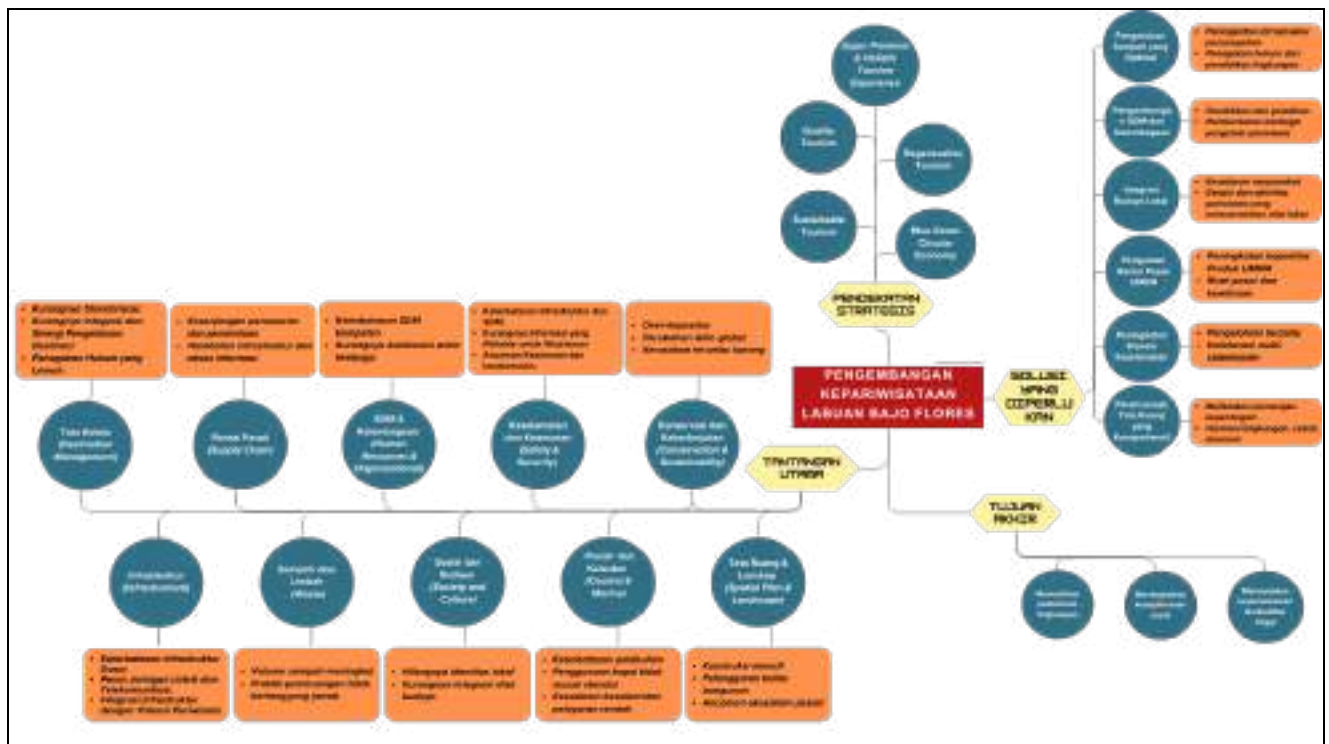
Selain itu, Tata Ruang & Lanskap yang tidak terkendali menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pariwisata Labuan Bajo. Konstruksi berlebihan yang tidak memperhatikan kontur alam dan pelanggaran batas bangunan di wilayah sempadan pantai telah mengubah lanskap alami dan mengancam ekosistem pesisir. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perencanaan tata ruang dan lanskap yang komprehensif, harmonis dan berkelanjutan, dengan memperhatikan keselarasan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta melibatkan semua pemangku kepentingan.

Sektor kelautan juga menghadapi tantangan, terutama terkait infrastruktur dan keselamatan pelayaran. Keterbatasan infrastruktur pelabuhan, penggunaan kapal yang tidak sesuai standar, dan kurangnya kesadaran akan keselamatan pelayaran dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan merusak lingkungan laut. Peningkatan standar keselamatan, pengelolaan terpadu, dan kolaborasi multi stakeholder menjadi kunci untuk mewujudkan wisata bahari yang aman dan berkelanjutan.

Pelestarian sosial-budaya juga menjadi perhatian penting. Kurangnya visibilitas budaya lokal dan penghayatan terhadap nilai-nilai lokal dalam pengembangan pariwisata dapat menyebabkan hilangnya identitas dan keunikan Labuan Bajo. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal tersebut dalam desain, tata ruang/ lanskap, dan aktivitas pariwisata, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya lokal dalam pariwisata.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan kelembagaan juga menjadi kunci dalam mengembangkan kepariwisataan yang berkelanjutan. Keterbatasan SDM yang kompeten dan kurangnya kolaborasi antar lembaga dapat menghambat upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta pembentukan lembaga independen yang fokus pada pengelolaan pariwisata, dapat meningkatkan efisiensi dan

Rantai pasok UMKM parekras juga perlu diperkuat agar dapat memenuhi permintaan pasar dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Kesenjangan antara penawaran dan permintaan produk, kurangnya komitmen kemitraan, serta hambatan infrastruktur dan akses informasi pasar perlu diatasi melalui berbagai upaya, seperti peningkatan kapasitas UMKM, riset pasar, pemahaman perilaku pengunjung/wisatawan, *customer journey*, fasilitasi kemitraan, dan pengembangan infrastruktur.



Sumber: Top Management BPOLBF,2024

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan pendekatan strategis yang memadukan konsep-konsep seperti *Sustainable Tourism*, *Quality Tourism*, *Regenerative Tourism*, *Blue Green Circular Economy*, dan *Super Premium & Holistic Tourism Experience*. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial, serta menawarkan pengalaman premium (*premium experiences*) dalam mengelola kepariwisataan yang berkualitas tinggi dan berdampak positif bagi masyarakat lokal.

BAB II

ISU STRATEGIS

2.1 Konservasi dan Keberlanjutan (*Conservation & Sustainability*)

Labuan Bajo, Flores dan sekitarnya meski memiliki potensi besar sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, tengah berhadapan dengan tantangan konservasi yang kompleks. Over kapasitas di Taman Nasional Komodo, perubahan iklim global, dan kerusakan terumbu karang menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan biodiversitas. Keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan yang lemah semakin memperparah situasi dan menghambat upaya konservasi yang efektif.

Konsekuensi dampak berantai dari permasalahan tersebut tentu mengkhawatirkan keberlanjutan pembangunan. Over kapasitas mengancam habitat Komodo dan memicu konflik dengan manusia, sementara perubahan iklim mengancam ketahanan pangan dan mengganggu bahkan merusak ekosistem penghidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Kerusakan terumbu karang berdampak pada keanekaragaman hayati laut dan mata pencaharian nelayan. Tantangan ini menuntut tindakan segera dan komprehensif, termasuk pengelolaan wisata berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, restorasi terumbu karang, serta penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan. Berikut tabel permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kepariwisataan isu konservasi dan keberlanjutan.

No.	Isu	Kendala Internal	Kendala Eksternal	Strategi
1.	Over kapasitas pariwisata di Taman Nasional Komodo Peningkatan jumlah pengunjung, kerusakan habitat komodo, dan konflik manusia-satwa	Keterbatasan infrastruktur, kurangnya kapasitas pengelolaan, penegakan hukum yang lemah, dan belum optimalnya integrasi <i>visitor management</i>	Perubahan iklim, peningkatan permukaan air laut	Pengelolaan pengunjung (<i>visitor management</i>) yang lebih baik, restorasi habitat, penegakan hukum yang tegas, pengembangan pariwisata alternatif, tata ruang wilayah, penyebaran pusat pertumbuhan ekonomi, sosial budaya di mainland dan daerah-daerah sekitar Flores, Lembata, Alor Penguatan TN sebagai <i>World Heritage</i> , Cagar Biosfer, dan <i>Global Geopark Network</i>
2.	Kerusakan terumbu karang. Sedimentasi, pencemaran, penangkapan ikan yang merusak	Keterbatasan pengetahuan masyarakat, kurangnya kesadaran akan	Perubahan iklim, peningkatan asam laut	Restorasi terumbu karang, pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan, penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat atas

		pentingnya terumbu karang, dan lemahnya penegakan hukum		potensi ekowisata, <i>Blue, Green, Circular and regenerative tourism</i> .
3.	Perubahan iklim global. Peningkatan suhu permukaan laut, perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi bencana alam	Ketergantungan pada sumber daya alam, rendahnya kesadaran masyarakat	Pemanasan global dan emisi gas rumah kaca	Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, pengembangan sistem peringatan dini bencana, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. Perhitungan Jejak Karbon untuk aktivitas kepariwisataan di Labuan Bajo Flores melibatkan seluruh stakeholder dan didukung regulasi Pemda/ Pemprov
4.	Keterbatasan Sumber Daya dan Kurangnya Ambians Konservasi (<i>Man of Biosphere & World Heritage Site</i>) Keterbatasan SDM, kelembagaan yang lemah, dukungan anggaran yang tidak memadai serta kurangnya kesadaran bahwa Kep. Komodo dan Labuan Bajo merupakan Kawasan Konservasi dan hidup dari Destinasi Konservasi	Tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya kapasitas pengelolaan, kelembagaan, pihak swasta dan masyarakat serta birokrasi yang kompleks	Peningkatan populasi manusia, perubahan tata guna lahan, keterbatasan sumber daya global untuk konservasi	Peningkatan kapasitas SDM, reformasi kelembagaan, penguatan kerjasama dengan pihak eksternal. Promosi Konservasi dan keberlanjutan melalui Event dan Kegiatan Olahraga juga dapat menjadi cara ampuh meningkatkan kesadaran masyarakat. Pembentukan Badan Peduli Taman Nasional dan Perairan di sekitarnya oleh masyarakat dan berbagai pihak untuk meningkatkan nilai konservasi

2.2 Tata Ruang & Lanskap (*Spatial Plan & Landscape*)

Labuan Bajo, sebagai destinasi pariwisata super prioritas tengah menghadapi tantangan tata ruang yang kompleks dan multidimensi. Pembangunan yang masif dan tidak terkendali telah mengakibatkan degradasi lanskap alami, mengancam integritas ekosistem pesisir dan membatasi akses masyarakat terhadap ruang publik. Ketimpangan pembangunan yang terkonsentrasi di Kawasan Taman Nasional dan Kecamatan Komodo berpotensi memicu konflik sumber daya dan tekanan lingkungan yang berlebihan.

Absennya penerapan arsitektur lokal yang berkelanjutan dan minimnya pemanfaatan energi terbarukan semakin memperparah permasalahan, mengikis identitas kultural Labuan Bajo (Bajo, Bugis, Bima & Manggarai) dan berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Dampak dari tata ruang yang tidak

berkelanjutan ini bersifat *multi-faceted* atau multi segi. Kerusakan lingkungan, erosi, dan hilangnya keanekaragaman hayati mengancam keberlanjutan ekosistem, sementara konflik sosial akibat minimnya akses publik dan kemacetan lalu lintas akibat keterbatasan transportasi umum dapat mengganggu kenyamanan wisatawan dan penduduk lokal.

Jika tidak ditangani secara komprehensif, permasalahan tata ruang dan lanskap ini dapat mengancam keberlanjutan pariwisata Labuan Bajo, mengurangi daya tariknya sebagai destinasi pariwisata, dan menghambat kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang dan lanskap yang holistik dan berkelanjutan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi menjadi sangat mendesak. Selain itu, penyebaran pertumbuhan yang merata ke seluruh Flores juga perlu dipertimbangkan untuk mengurangi tekanan pada wilayah tertentu dan memastikan pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkeadilan.

No.	Isu	Kendala Internal	Kendala Eksternal	Strategi
1.	Tata Ruang dan Lanskap yang Tidak Terkendali. Konstruksi tidak sesuai kontur, pelanggaran batas bangunan, minimnya akses publik	Konstruksi berlebih, tidak ada panduan desain arsitektur lokal, dan penegakan peraturan yang lemah	Penyebaran pertumbuhan ke seluruh Flores, RIPDN yang tidak komprehensif (fokus hanya pada Taman Nasional dan Kecamatan Komodo)	Perencanaan tata ruang dan lanskap yang komprehensif (RIPDN Komodo Labuan Bajo dan Flores) dan berkelanjutan, melibatkan semua pemangku kepentingan, memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta karakteristik keunikan dan otentisitas Labuan Bajo Flores dan sekitarnya sebagai <i>outstanding values proposition</i>
	Belum sinkronnya keterpaduan tata ruang pesisir/perairan, terestrial, dan tata ruang sosio budaya	Masih adanya ego sektoral dan terbatasnya sumber daya	Masih ada potensi yang dapat memperkuat keterkaitan pembangunan sektoral dan perwilayahan di Flores Nusa Tenggara Timur,	Integrasi Tata ruang dan penciptaan: <i>new tourism area/ tourism cluster</i> , Pusat pertumbuhan dan sentra ekonomi, klaster Industri Berbasis Sumber daya BGCE, Kesatuan Flores, Lembata Alor dengan dukungan konektivitas darat, laut dan udara

2.	Lingkungan. Erosi, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran	Konstruksi di kawasan sensitif, pengelolaan sampah yang buruk, limbah dari aktivitas pariwisata	Perubahan iklim, dan kenaikan permukaan air laut	Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, konservasi kawasan lindung, dan pengelolaan limbah yang efektif
3.	Pengurangan Akses Masyarakat. Minimnya akses pantai publik, keterbatasan transportasi umum	Prioritas pembangunan untuk wisatawan dan kurangnya fasilitas publik	Ketimpangan sosial ekonomi	Pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat
4.	Hilangnya Identitas Lokal. Kurangnya arsitektur lokal, homogenisasi budaya, kehilangan <i>sense of place</i> dan ambians budaya lokal.	Tekanan komersialisasi dan kurangnya apresiasi terhadap nilai budaya lokal	Globalisasi, persaingan antar destinasi pariwisata	Pelestarian budaya lokal, pengembangan produk wisata berbasis budaya, dan promosi destinasi yang unik
5.	Ketidakberlanjutan Pariwisata. Penurunan daya tarik wisata dan konflik sosial	Ketergantungan pada pariwisata massal dan kurangnya diversifikasi ekonomi	Perubahan tren pariwisata global	Pengembangan pariwisata berkelanjutan, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan kualitas SDM pariwisata

2.3 Pesisir dan Kelautan (*Coastal & Marine*)

Selain dikenal sebagai *playing field* yang impresif untuk kegiatan pariwisata bahari, Labuan Bajo, dan kawasan pesisir di sekitarnya, sebagai destinasi pariwisata bahari yang sedang berkembang pesat, menghadapi tantangan signifikan dalam hal infrastruktur dan keselamatan pelayaran. Keterbatasan infrastruktur pelabuhan, penggunaan kapal yang tidak sesuai standar, dan rendahnya kesadaran akan keselamatan pelayaran berkontribusi pada peningkatan risiko kecelakaan laut dan kerusakan lingkungan. Pembangunan yang tidak terkendali di wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, termasuk vila dan hotel yang melanggar batas sempadan pantai, memperparah permasalahan ini, mengancam ekosistem laut yang rentan dan membatasi akses publik. Lemahnya pengawasan di wilayah perairan semakin memperburuk situasi, sehingga isu-isu ini seringkali luput dari perhatian pemerintah daerah.

Kurangnya perencanaan yang matang dalam pengelolaan pariwisata bahari di Labuan Bajo juga menjadi perhatian serius. Kurangnya kesadaran pihak pengelola kapal terhadap pentingnya keselamatan pelayaran, minimnya informasi mengenai lokasi *diving* dan *snorkeling*, serta ketiadaan peringatan dan persyaratan yang jelas dalam aktivitas tersebut, meningkatkan risiko kecelakaan bagi wisatawan. Dampak negatif dari permasalahan ini tidak hanya terbatas pada kerugian materi dan

korban jiwa, tetapi juga mengancam keberlanjutan pariwisata dan lingkungan di Labuan Bajo. Oleh karena itu, peningkatan standar keselamatan dan pengelolaan wisata bahari yang terintegrasi, termasuk peningkatan infrastruktur pelabuhan, standarisasi kapal wisata, dan peningkatan kesadaran akan keselamatan pelayaran, menjadi sangat mendesak. Kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat lokal juga diperlukan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di wilayah kepulauan, baik di dalam maupun di luar Taman Nasional. Berikut terlampir tabel isu dari Pesisir dan Kelautan (*Coastal & Marine*):

No.	Isu	Kendala Internal	Kendala Eksternal	Strategi
1.	Infrastruktur Pelabuhan yang Tidak Memadai. Keterbatasan fasilitas, dermaga tidak aman, akses terbatas	Kurangnya investasi, perencanaan yang tidak matang, pengawasan yang lemah	Keterbatasan anggaran daerah, regulasi yang belum optimal	Peningkatan investasi infrastruktur pelabuhan, perbaikan dermaga, pengembangan aksesibilitas
2.	Keselamatan Pelayaran yang Rendah. Kapal tidak laik laut, kurangnya peralatan keselamatan, rute pelayaran tidak jelas	Kurangnya kesadaran akan keselamatan, penegakan hukum yang lemah, kurangnya pelatihan bagi nakhoda dan ABK	Cuaca ekstrem, kondisi laut yang dinamis	Standarisasi kapal wisata, peningkatan pengawasan, pelatihan keselamatan bagi pelaku wisata
3.	Pengelolaan Wisata Bahari yang Tidak Optimal. Lokasi <i>diving</i> dan <i>snorkeling</i> tidak terpetakan, kurangnya informasi tentang peringatan dan persyaratan	Kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya koordinasi antar <i>stakeholder</i>	Tekanan komersialisasi, pertumbuhan pariwisata yang cepat	Pengembangan rencana pengelolaan kawasan wisata bahari, pembentukan badan pengelola, promosi wisata yang bertanggung jawab
4.	Dampak Negatif terhadap Lingkungan. Kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, hilangnya keanekaragaman hayati	Aktivitas wisata yang tidak ramah lingkungan, kapal2 itu hrs pakai solar bukan bensin. Karang di sekitar pulau Padar mulai rusak dikarenakan volume kapal berlebih (sekitar 50 kapal) yang membuang jangkar di lokasi tersebut merusak terumbu karang; pengelolaan sampah yang buruk, pembangunan yang tidak terkendali	Perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut	Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, konservasi kawasan lindung, pengelolaan limbah yang efektif Regulasi yang tegas, <i>Dos & Don'ts</i> , Sanksi yang jelas untuk pengelolaan kawasan konservasi, disertai pengaturan zonasi, daya dukung dan <i>environmental impact assessment</i> (EIA)
5	Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil sekitar TNK	pengelolaan kelembagaan desa	Keterbatasan anggaran daerah,	Peningkatan kapasitas Desa pesisir pantai melalui

	Diperlukan Pengelolaan kelembagaan desa dan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan desa pesisir	yang dirasa masih memerlukan pendampingan dari lembaga/dinas terkait,	regulasi yang belum optimal	pelatihan-pelatihan yang mengedepankan edukasi terkait ekosistem laut dan pengelolaan sampah Regulasi untuk Pengaturan izin usaha pengelolaan pulau-pulau kecil untuk memperhatikan konservasi lingkungan dan pendekatan berbasis masyarakat lokal.
--	--	---	-----------------------------	--

2.4 Sosial dan Budaya (*Society and Culture*)

Pelestarian dan pengembangan pariwisata Budaya di destinasi pariwisata super prioritas, menghadapi tantangan yang berat dalam mengintegrasikan pertumbuhan pariwisata modern dengan pelestarian nilai-nilai sosial budaya lokal. Ketidakmampuan dalam menghadirkan pengalaman gastronomi lokal yang autentik dan minimnya refleksi budaya pada lanskap fisik destinasi mencerminkan kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai lokal dalam pengembangan pariwisata. Hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ritus dan budaya lokal, serta potensi wisata religi Katolik Flores yang belum teroptimalkan.

Kondisi ini berpotensi mengikis identitas budaya Labuan Bajo, memicu konflik sosial, dan menghambat keberlanjutan pariwisata serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata di Labuan Bajo perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik, mengintegrasikan pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pemanfaatan potensi wisata religi Katolik Flores, pengembangan desa wisata dan sentra kreatif, serta penguatan kalender event daerah dapat menjadi strategi kunci dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

No.	Isu	Kendala Internal	Kendala Eksternal	Strategi
1.	Hilangnya Identitas Budaya Lokal. Kurangnya pilihan kuliner lokal, minimnya refleksi budaya dalam desain, kurangnya kesadaran masyarakat	Komersialisasi pariwisata, kurangnya dukungan pemerintah, kurangnya inovasi produk budaya	Globalisasi, persaingan antar destinasi pariwisata	Pengembangan produk wisata berbasis budaya, pelestarian warisan budaya, promosi budaya lokal Peningkatan <i>look & feel</i> , <i>sense of place</i> utk arsitektur bangunan, gastronomi lokal, lokal busana, dan lainnya
2.	Konflik Sosial Budaya. Kurangnya pemahaman akan	Kurangnya dialog antar budaya,	Perbedaan agama dan kepercayaan	Pengembangan pariwisata yang inklusif termasuk

	nilai-nilai ritus (profan dan non profan), perbedaan antara masyarakat lokal dan wisatawan	kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata		generasi muda, dialog antar budaya, peningkatan kesadaran akan keberagaman dan gerakan transformasi sosial budaya
3.	Potensi Pariwisata Religi yang Belum Tergarap. Kurangnya pemahaman mengenai potensi wisata religi (Katolik), kurangnya infrastruktur pendukung	Kurangnya koordinasi antar stakeholder, kurangnya promosi	Persaingan dengan destinasi pariwisata religi lainnya	Pengembangan produk pariwisata religi, promosi wisata religi, CoE Terintegrasi se- Flores dan sekitarnya CoE Tematik, kerjasama dengan pihak gereja
4.	Kurangnya Pengembangan Desa Wisata. Kurangnya pengembangan desa wisata, kurangnya sentra kreatif	Kurangnya dukungan pemerintah, kurangnya sumber daya manusia yang resilient	Perkembangan pariwisata yang tidak merata	Pengembangan desa wisata, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM
5	Unesco World Heritage Site. (UWHS) Desa wisata potensial yang belum masuk dalam situs warisan dunia UNESCO	perlunya peningkatan awareness dari semua pemangku kepentingan akan pentingnya suatu desa wisata masuk dalam UWHS	Persaingan dengan Desa wisata Lainnya	Koordinasi dan Kolaborasi dari semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan desa wisata masuk dalam UWHS terutama desa wisata potensial (Todo, Waerebo, Bena, dll)
6	Ekonomi Digital . Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemasaran digital dan transformasi masyarakat LBF menuju society 5.0	Kurangnya Pemahaman akan keuntungan yang diperoleh jika menerapkan Ekonomi Digital.	Beradaptasi dengan Era Global yang serba digital	Peningkatan Kapasitas SDM terkait pemasaran secara Digital Penyediaan fasilitas untuk memperluas daya jangkauan internet ke Desa-Desa

2.5 Keselamatan dan Keamanan (*Safety & Security*)

Masalah keselamatan dan keamanan di Labuan Bajo memiliki dampak negatif yang signifikan. Frekuensi kecelakaan kapal yang tinggi menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem keselamatan pelayaran. Kurangnya sistem komunikasi yang memadai antara kapal dengan daratan, serta jumlah personil pengawas yang terbatas, memperlambat respons dalam situasi darurat. Kondisi cuaca ekstrem dan topografi perairan yang kompleks juga meningkatkan risiko kecelakaan. Ancaman keamanan seperti terorisme, radikalisme, narkoba, dan prostitusi juga menjadi perhatian serius, mengingat tingginya jumlah wisatawan asing yang berkunjung. Semua ini dapat merusak citra pariwisata Labuan Bajo, membuat wisatawan merasa tidak aman, mengganggu ketertiban umum, dan merusak hubungan antara masyarakat lokal dan wisatawan.

No.	Isu	Kendala Internal	Kendala Eksternal	Strategi
1.	Keterbatasan Infrastruktur dan SDM. Fasilitas pelabuhan terbatas, kurangnya peralatan keselamatan, kurangnya TIC	Kurangnya investasi, perencanaan yang tidak matang, kurangnya SDM terlatih	Keterbatasan anggaran daerah, regulasi yang belum optimal	Peningkatan investasi infrastruktur pelabuhan, pengadaan peralatan keselamatan, pengembangan TIC, pelatihan SDM Pembentukan Komunitas Balawista (Safety Guard)
2.	Risiko Kecelakaan Tinggi. Frekuensi kecelakaan tinggi, kurangnya sistem komunikasi, kondisi cuaca ekstrem	Penegakan hukum yang lemah, kurangnya kesadaran akan keselamatan, topografi perairan yang kompleks	Perubahan iklim, peningkatan aktivitas maritim	Peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, pengembangan sistem peringatan dini, jalur pelayaran yang aman dan penerapan protokol CHSE
3.	Ancaman Keamanan dan keselamatan. Terorisme, radikalisme, narkoba, prostitusi	Kurangnya koordinasi antar lembaga, kurangnya intelijen, kerentanan wilayah perbatasan	Jaringan kejahatan transnasional, konflik sosial	Peningkatan intelijen, koordinasi antar lembaga, penegakan hukum yang tegas, kerjasama dengan masyarakat
4.	Kurangnya Informasi yang <i>Reliable</i> untuk Wisatawan. Kurangnya TIC, informasi yang tidak akurat, Banyaknya kasus penipuan penjualan paket TA/TO	Kurangnya koordinasi antar stakeholder, kurangnya sumber daya manusia	Perkembangan teknologi informasi yang cepat	Pengembangan TIC yang komprehensif, penyediaan informasi yang akurat dan terkini, validasi agen kepariwisataan di Labuan Bajo, pemanfaatan teknologi informasi

2.6 SDM & Kelembagaan (*Human Resources & Institutions*)

Kesenjangan antara kebutuhan industri pariwisata dengan ketersediaan tenaga kerja terampil menjadi masalah yang menonjol. Kurangnya lembaga pendidikan tinggi pariwisata di wilayah Labuan Bajo membuat masyarakat lokal harus menempuh pendidikan di luar daerah, yang seringkali menimbulkan kendala finansial dan sosial. Program pelatihan yang ada seringkali tidak terintegrasi dengan kebutuhan industri dan tidak berkelanjutan. Jenis pelatihan yang masih terlalu sporadis dan kadang tidak tepat sasaran juga menjadi masalah. Pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri akan mengurangi efektivitasnya dalam meningkatkan kompetensi SDM. Selain itu, tata kelola destinasi yang belum optimal dan kurangnya lembaga independen yang fokus pada pengelolaan pariwisata menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. Koordinasi antar lembaga yang kurang efektif serta kurangnya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan menghambat upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, termasuk masalah SDM.

No.	Isu	Kendala Internal	Kendala Eksternal	Strategi
1.	Keterbatasan SDM yang Kompeten. Kurangnya SDM di manajemen menengah dan atas, akses terbatas ke pendidikan tinggi pariwisata	Kurangnya investasi dalam pendidikan, kurangnya program pelatihan, kurangnya insentif bagi tenaga kerja	Keterbatasan anggaran daerah, persaingan dengan sektor lain	Pengembangan pendidikan vokasi pariwisata (pembangunan poltekpar negeri), program beasiswa, peningkatan insentif, kerjasama dengan perguruan tinggi
2.	Kesenjangan Pendidikan dan Pelatihan. Kurangnya lembaga pendidikan tinggi, program pelatihan tidak terintegrasi dengan industri	Kurikulum yang tidak relevan, kurangnya fasilitas pelatihan, kurangnya pendanaan	Perubahan cepat tren industri pariwisata, persaingan global	Pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan fasilitas pelatihan, kerjasama dengan industri, program magang dan edukasi transformasi sosial budaya
3.	Kelemahan Tata Kelola dan Kelembagaan. Koordinasi antar lembaga lemah, kurangnya lembaga independen	Birokrasi yang kompleks, kurangnya kapasitas institusi, kurangnya partisipasi masyarakat	Perubahan kebijakan pemerintah, tekanan politik	Peningkatan koordinasi antar lembaga, pembentukan lembaga pengelola destinasi, pemberdayaan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas
4.	Keterbatasan SDM Vokasi. Kurangnya SDM di bidang vokasi, seperti Keselamatan dan Keamanan (<i>Safety & Security</i>)	Kurangnya minat masyarakat, kurangnya fasilitas pelatihan, kurangnya sertifikasi	Perkembangan teknologi yang cepat, tuntutan kualitas layanan yang tinggi	Pengembangan program pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, kerjasama dengan industri

2.7 Sampah atau Limbah (*Waste*)

Tantangan serius dalam pengelolaan sampah yang terus meningkat. Volume sampah yang dihasilkan baik dari aktivitas wisata maupun dari daratan menjadi masalah utama. Kurangnya fasilitas persampahan yang memadai, seperti tong sampah di berbagai titik strategis, membuat sampah seringkali dibuang sembarangan. Peningkatan jumlah wisatawan juga berkontribusi terhadap peningkatan volume sampah yang dihasilkan.

Selain masalah kuantitas, kualitas pengelolaan sampah di Labuan Bajo Flores juga menjadi perhatian. Praktik pembuangan sampah sembarangan masih sering terjadi, baik oleh wisatawan maupun masyarakat lokal. Kapal-kapal wisata yang membuang limbah ke laut tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu menjadi masalah serius yang mengancam ekosistem laut. Situasi ini diperparah dengan belum adanya fasilitas pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang biasanya dihasilkan oleh kapal pesiar/wisata. Dampak negatif dari masalah sampah ini sangat signifikan, termasuk pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, penurunan kualitas destinasi pariwisata, dan

potensi penurunan minat wisatawan.

No.	Isu	Kendala Internal	Kendala Eksternal	Strategi
1.	Peningkatan Volume Sampah/limbah Jumlah sampah terus meningkat, fasilitas persampahan tidak memadai	Pertumbuhan pariwisata yang pesat, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah	Perubahan pola konsumsi, produksi sampah per kapita tinggi	Peningkatan kapasitas dan Fungsi TPA (Insinerator) Warloka, optimalisasi pengumpulan sampah, pemilahan sampah dari sumber
2.	Praktik Pembuangan Sampah Sembarangan. Pembuangan sampah sembarangan oleh wisatawan dan masyarakat, pembuangan limbah kapal ke laut	Kurangnya kesadaran lingkungan, penegakan hukum yang lemah, kurangnya fasilitas pengolahan limbah	Perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut	Kampanye kesadaran lingkungan, penegakan hukum yang tegas, pembangunan fasilitas pengolahan limbah, terutama limbah B3
3.	Dampak Negatif terhadap Lingkungan dan Pariwisata. Pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, penurunan kualitas destinasi pariwisata	Kurangnya kesadaran akan dampak lingkungan, kurangnya partisipasi masyarakat	Perubahan iklim, tekanan global terhadap pariwisata berkelanjutan	penerapan prinsip ekonomi sirkular, pengembangan pariwisata berkelanjutan, restorasi lingkungan
4.	Akar Masalah pada Perilaku dan Budaya. Kurangnya kesadaran lingkungan, kebiasaan membuang sampah sembarangan	Kurangnya pendidikan lingkungan, kurangnya partisipasi masyarakat	Perubahan gaya hidup, pengaruh budaya konsumtif	Pendidikan lingkungan sejak dini, perubahan perilaku masyarakat, melibatkan tokoh masyarakat

2.8 Rantai Pasok (Supply Chain)

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan rantai pasok di Labuan Bajo adalah ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan produk UMKM parekraf. Meskipun memiliki potensi besar, UMKM parekraf lokal seringkali belum mampu memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh pasar. Keterbatasan akses terhadap teknologi, modal, dan informasi pasar menjadi faktor penghambat. Di sisi lain, permintaan pasar terhadap produk UMKM parekraf lokal seringkali belum teridentifikasi dengan jelas, sehingga menyulitkan UMKM untuk menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhan pasar.

Kurangnya komitmen dari pihak pembeli untuk menerima produk dari UMKM parekraf lokal menjadi kendala lain dalam pengembangan rantai pasok. Implementasi kemitraan rantai pasok yang berkelanjutan masih menjadi tantangan, dengan banyak UMKM kesulitan mendapatkan kontrak jangka panjang. Selain itu, terdapat beberapa hambatan lain, seperti kurangnya infrastruktur yang

memadai, biaya produksi yang tinggi, dan akses terbatas terhadap informasi pasar. Semua ini berdampak signifikan terhadap pertumbuhan UMKM parekraf, menghambat pertumbuhan usaha, dan menyulitkan UMKM untuk berkembang.

No.	Isu	Kendala Internal	Kendala Eksternal	Strategi
1.	Kesenjangan Penawaran dan Permintaan. Kualitas dan kuantitas produk tidak sesuai pasar, demand pasar belum teridentifikasi	Kurang akses teknologi, modal, informasi pasar	Standar kualitas pasar tinggi, persaingan ketat	Pengembangan produk berbasis riset pasar, pelatihan peningkatan kualitas, akses pendanaan, pengembangan jaringan pemasaran
2.	Kurangnya Komitmen Kemitraan. Sulit mendapatkan kontrak jangka panjang, ketidakpercayaan pembeli	Kualitas produk tidak konsisten, kapasitas produksi terbatas, kurangnya negosiasi	Persaingan antar pemasok, preferensi pembeli terhadap produk besar	Pengembangan branding UMKM, peningkatan kapasitas produksi, fasilitasi negosiasi, sertifikasi produk
3.	Hambatan Infrastruktur, Regulasi dan Biaya. Infrastruktur produksi dan distribusi tidak memadai, biaya produksi tinggi	Akses terbatas ke sumber daya alam, biaya logistik tinggi, termasuk keberpihakan regulasi	Keterbatasan infrastruktur daerah, biaya hidup tinggi	Pengembangan infrastruktur dan regulasi pemerintah daerah/pusat pendukung UMKM, efisiensi produksi, kerjasama antar UMKM
4.	Akses Informasi Terbatas. Sulit mengakses informasi pasar, tren pasar	Kurangnya data pasar yang akurat, terbatasnya akses internet	Perubahan tren pasar yang cepat, persaingan global	Pengembangan platform informasi pasar, pelatihan digital marketing, kerjasama dengan lembaga riset

2.9 Infrastruktur (Infrastructure)

Infrastruktur dasar merupakan elemen krusial dalam pengembangan pariwisata Labuan Bajo. Keandalan jaringan listrik, jalan trans Flores yang memadai, serta akses telekomunikasi yang baik menjadi prasyarat mutlak untuk menunjang aktivitas pariwisata. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti tempat pengelolaan limbah, pengaturan lalu lintas kapal, dan pusat penampungan/distributor bahan bakar juga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kenyamanan wisatawan.

Jaringan listrik yang stabil dan akses telekomunikasi yang memadai diperlukan untuk mendukung operasional fasilitas pariwisata dan memudahkan wisatawan. Jalan trans Flores yang berkualitas baik akan memperlancar aksesibilitas menuju destinasi pariwisata di sekitar Labuan Bajo. Pengelolaan

limbah yang memadai sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan. Selain itu, pengaturan penyandaran kapal perlu dilakukan secara cermat untuk menjaga keindahan kawasan pesisir dan kelancaran lalu lintas laut. Pengembangan infrastruktur di Labuan Bajo harus dilakukan secara terintegrasi dengan potensi wisata yang ada, tidak hanya berfungsi sebagai pendukung aktivitas pariwisata, tetapi juga harus mampu meningkatkan nilai estetika dan budaya kawasan.

No.	Isu	Kendala Internal	Kendala Eksternal	Strategi
1.	Keterbatasan Infrastruktur Dasar. Jaringan listrik tidak stabil, jalan rusak menuju DTW Unggulan dan gang dalam kota, akses telekomunikasi terbatas, fasilitas pengelolaan limbah kurang	Anggaran terbatas, pertumbuhan pariwisata yang cepat, kurangnya pemeliharaan	Perubahan iklim, bencana alam, keterbatasan sumber daya alam	Peningkatan investasi infrastruktur, pemeliharaan rutin, pengembangan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang berkelanjutan
2.	Peran Jaringan Listrik dan Telekomunikasi. Permintaan listrik terus meningkat, akses internet terbatas	Kapasitas pembangkit terbatas, jaringan distribusi belum optimal, biaya investasi tinggi	Perkembangan teknologi yang cepat, kebutuhan bandwidth yang tinggi	Peningkatan kapasitas pembangkit, pembangunan Kilang Pertamina (BBM dan Gas) Labuan Bajo, perluasan jaringan distribusi rantai pasok, pengembangan infrastruktur telekomunikasi, pemanfaatan energi terbarukan
3.	Pentingnya Jalan Trans Flores. Kondisi jalan rusak, kapasitas jalan terbatas, terbatasnya jalur akses pasokan BBM dan rantai pasok untuk Kepariwisata LBJ.	Anggaran terbatas, sulitnya akses ke lokasi proyek	Pertambahan volume kendaraan, pertumbuhan ekonomi daerah	Perbaikan dan pelebaran jalan, pembangunan jalan alternatif, pemeliharaan rutin, pengaturan lalu lintas
4.	Pengelolaan Limbah dan Transportasi Laut. Limbah belum terkelola dengan baik, pengaturan lalu lintas kapal belum optimal	Kurangnya fasilitas pengolahan limbah, kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran	Peningkatan jumlah wisatawan, aktivitas perkapalan yang intensif	Pembangunan fasilitas pengolahan limbah, penegakan peraturan, sosialisasi kepada masyarakat, pengaturan zonasi pelabuhan (Kapal Roro ke Pelabuhan Wae Kelambu dan marina hanya menerima pelayanan Kepariwisata)
5.	Integrasi Infrastruktur dengan Potensi Pariwisata. Infrastruktur belum	Kurangnya perencanaan yang komprehensif,	Perubahan tren pariwisata, tuntutan wisatawan yang	Perencanaan tata ruang dan lanskap yang terintegrasi, melibatkan

	terintegrasi dengan destinasi pariwisata, kurang memperhatikan aspek estetika dan budaya	kurangnya partisipasi masyarakat	semakin tinggi	masyarakat dalam perencanaan, pengembangan desain infrastruktur yang ramah lingkungan
--	--	----------------------------------	----------------	---

2.10 Tata Kelola (*Destination Management & Destination Governance*)

Peningkatan jumlah wisatawan yang tidak terkendali, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, implementasi sistem tata kelola yang komprehensif menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan pariwisata di Labuan Bajo. Penegakan hukum yang tegas terkait permasalahan kepariwisataan menjadi salah satu tantangan utama. Pelanggaran izin usaha, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial harus ditindaklanjuti secara tegas. Standarisasi usaha dan pelayanan kepariwisataan juga penting untuk meningkatkan kualitas pariwisata. Selain itu, integrasi dan sinergi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi menjadi kunci untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat guna.

No.	Isu	Kendala Internal	Kendala Eksternal	Strategi
1.	Penegakan Hukum yang Lemah. Pelanggaran izin usaha, kerusakan lingkungan, konflik sosial	Penegakan hukum yang tidak konsisten, kurangnya sumber daya	Perubahan regulasi yang cepat, tekanan politik	Penguatan kelembagaan penegakan hukum, transparansi, partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas SDM penegak hukum
2.	Kurangnya Standarisasi. Kualitas produk dan layanan tidak seragam, wisatawan kesulitan memilih	Kurangnya regulasi yang jelas, lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran pelaku usaha	Persaingan global, tuntutan kualitas wisatawan semakin tinggi	Pengembangan standar pelayanan, sertifikasi usaha, pengawasan yang efektif, promosi destinasi berkualitas melalui standar kompetensi, standar usaha dan standar produk pariwisata
3.	Kurangnya Integrasi dan Sinergi Pengelolaan Destinasi Koordinasi antar pemangku kepentingan lemah, kurangnya partisipasi masyarakat	Birokrasi yang kompleks, ego sektoral, kurangnya komunikasi efektif	Perubahan kebijakan pemerintah pusat, dinamika politik lokal	Pembentukan forum koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, transparansi pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan Penguatan fungsi manajemen, (<i>Destination Management Organization</i>) tata kelola (<i>Destination</i>

				<i>Governance</i>) dan kepemimpinan destinasi pariwisata (<i>Destination Leadership</i>) Labuan Bajo Flores dan sekitarnya
4.	Hak Kekayaan Intelektual. Sosialisasi terkait pentingnya HKI perlu ditingkatkan.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait HKI dan perlunya sosialisasi berkala terkait HKI oleh dinas terkait	Adanya potensi terkait dianggap melanggar merek dagang Tidak ada perlindungan rahasia dagang, dan Hasil karya orang lain dapat dengan mudah dibajak dan dicuri	Program pendaftaran HKI untuk pelaku pariwisata secara berkali.
5.	Tata Kelola Sumber Daya : Pengelolaan Air, Energi Baru Terbarukan, Fenomena Deforestasi, Pencegahan Pencemaran Lingkungan, Polusi Udara, Polusi Suara dan Transportasi Ramah Lingkungan	Kurangnya infrastruktur pengolahan limbah dan lemahnya pengawasan Kurangnya insentif penggunaan energi baru terbarukan dan keterbatasan teknologi Lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat atas pengrusakan hutan, polusi lingkungan dan polusi udara. Keterbatasan infrastruktur transportasi umum, biaya operasional tinggi	Perubahan iklim, pertumbuhan penduduk Harga energi fosil yang masih kompetitif, keterbatasan infrastruktur Pertumbuhan penduduk, permintaan produk kebutuhan rumah tangga yang tinggi Ketergantungan pada kendaraan pribadi	Perumusan rencana aksi bersama, strategi ko-kreasi dan kolaborasi antar KL
	Tata kelola ekonomi digital dan inovasi produk pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya	Belum optimal pemanfaatan digitalisasi, terbatas literasi digital dan ekosistem digital dalam pembangunan sektor parekraf		Penguatan <i>local champion</i> , literasi digital, sentra kreatif, <i>creative digital preneurship</i> dalam menghasilkan produk parekraf yang inovatif Pengembangan pendidikan <i>entrepreneurship</i> dan penguatan ekosistem UMKM

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

Para pihak dan Pemerintah daerah memegang peran kunci dalam mewujudkan Labuan Bajo Flores dan sekitarnya sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Komitmen dan konsistensi kebijakan pembangunan kepariwisataan sebagai sektor pilihan strategis, alokasi anggaran untuk infrastruktur dasar termasuk infrastruktur penguatan rantai pasok melalui sentra pertanian dan industri pendukung, SDM, dan konservasi menjadi pondasi penting. Pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung akan meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Peningkatan kapasitas SDM di sektor pariwisata dan non-pariwisata akan memastikan pelayanan berkualitas dan pengelolaan destinasi yang profesional. Sementara itu, program konservasi akan menjaga keunikan seraya sebagai perwujudan glorifikasi alam dan budaya Labuan Bajo, Flores.

Dengan memprioritaskan aspek ini, para pihak dan pemerintah daerah dapat menciptakan sinergi yang kuat antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Labuan Bajo Flores dan sekitarnya akan berkembang menjadi destinasi pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha, perguruan tinggi, pemerintah dan media serta organisasi lingkungan, semakin memperkuat penguatan *outstanding values proposition* Labuan Bajo, Flores sebagai model pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab dan berdampak positif bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Tiga isu dasar yaitu Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Konservasi dengan rincian:

1. Infrastruktur:

- **Infrastruktur Dasar:** Peningkatan dan perluasan jaringan listrik, jalan, dan telekomunikasi akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas Labuan Bajo, baik bagi wisatawan maupun masyarakat lokal. Infrastruktur yang memadai akan mendukung pertumbuhan berbagai sektor ekonomi, termasuk pariwisata.
- **Infrastruktur Pendukung:** Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah yang modern dan efisien akan menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran, terutama di kawasan pesisir dan laut. Selain itu, investasi dalam transportasi laut yang aman dan andal akan memastikan kelancaran arus wisatawan dan barang, sekaligus mendukung kegiatan konservasi di Taman Nasional Komodo. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung jalur distribusi dan rantai pasok memberikan kontribusi positif atas ketersediaan bahan, materi dan

kebutuhan logistik masyarakat dan penyelenggaraan kepariwisataan.

2. Sumber Daya Manusia Kepariwisata:

- **Peningkatan Kapasitas:** Pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat lokal, khususnya di sektor pariwisata dan hospitality, akan meningkatkan kualitas layanan dan menciptakan lapangan kerja baru. Pendirian Politeknik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Negeri dan Swasta menjadi sebuah kebutuhan yang krusial. Program sertifikasi kompetensi akan memastikan standar kualitas yang tinggi dan meningkatkan daya saing SDM lokal di pasar kerja.
- **Pengembangan Kewirausahaan:** Selain pelatihan di bidang pariwisata, pengembangan kewirausahaan di sektor pariwisata dan non-pariwisata juga penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, pelatihan di bidang pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan akan memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata. Selain itu program penciptaan kader konservasi, wirausaha muda, local champion dapat meningkatkan peluang usaha dan kesempatan kerja.

3. Konservasi dan keberlanjutan

- **Pelestarian Lingkungan:** Implementasi program konservasi lingkungan yang ketat, termasuk pemantauan dan perlindungan ekosistem laut dan darat, akan memperkuat nilai keunikan dan keindahan alam Labuan Bajo. Peningkatan kesadaran bahwa Komodo - Labuan Bajo merupakan wilayah dengan status *Man of Biosphere* dan *World Heritage Site* dalam bentuk sosialisasi, event atau kegiatan olahraga. Kolaborasi dengan Taman Nasional Komodo dan organisasi lingkungan lainnya sangat penting dalam upaya ini.
- **Pelestarian Budaya dan Pusaka:** Melestarikan budaya, pusaka dan tradisi lokal akan memperkaya pengalaman pengunjung/wisatawan dan memberikan nilai tambah bagi destinasi. Program-program pelestarian budaya, seperti pertunjukan seni, festival, dan pelatihan bagi generasi muda, akan memastikan keberlanjutan warisan budaya Labuan Bajo.

Dengan memprioritaskan ketiga isu utama ini dan mengalokasikan anggaran secara bijaksana, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pengembangan pariwisata di Labuan Bajo berjalan secara berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, terdapat tujuh isu strategis yang perlu diperhatikan dalam mendukung Labuan Bajo Flores

dan sekitarnya sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif diantaranya;

- 1) **Keselamatan dan Keamanan:** Labuan Bajo, sebagai destinasi pariwisata super prioritas, menghadapi tantangan dalam hal *safety & security* serta *visit management*. Salah satu area yang memerlukan perhatian khusus adalah Marina, yang menjadi titik masuk utama bagi pengunjung/wisatawan yang akan mengunjungi Taman Nasional Komodo dan pulau-pulau serta perairan sekitarnya. Beberapa hal yang menjadi isu utama dalam mendorong Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia, berkelanjutan dan inklusif.
 - a. **Penumpukan Pengunjung di destinasi pariwisata:** hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengunjung yang datang ke destinasi pariwisata di Labuan Bajo, maka dari itu diperlukan pengelolaan *Visitor Management* di semua destinasi pariwisata serta menerapkan sistem pengelolaan satu pintu.
 - b. **Pengawasan dan Pengamanan:** Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata laut (*Marine and Coastal Tourism Destination*) dan rentan terhadap kecelakaan tenggelam kapal dan lainnya, maka diperlukan sistem monitoring berkala dari petugas untuk fasilitas wisata Laut maupun darat yang ada. Untuk meminimalisir terjadinya potensi kecelakaan tersebut perlu adanya *Command Center* satu pintu sehingga proses pengawasan dan pengamanan menjadi lebih terpusat dan akan mudah dalam mengidentifikasi potensi ancaman yang akan terjadi
 - c. **Penipuan dan Pemalsuan Tiket:** Sistem penjualan paket wisata yang masif dengan menggunakan media sosial mengakibatkan rentan terhadap penipuan. Sebagai upaya untuk meminimalisir ternyata Sistem maka diperlukan pengecekan berkala untuk travel agent yang menjual paket wisata di Labuan Bajo dan sekitarnya serta menyediakan platform sosial media /website resmi yang memuat rekomendasi atau daftar travel agent ilegal yang beroperasi di Labuan Bajo dan sekitarnya dan atau penggunaan *Artificial Intelligence (AI)*.
- 2) **Sosial-Budaya:** Manggarai Barat merupakan destinasi yang kaya akan keberagaman budaya lokalnya, namun hal ini tidak terlihat di permukaan/ oleh wisatawan, hal ini dikarenakan Kurangnya orientasi lokasi/bangunan atau informasi yang mencerminkan budaya lokal. Maka ini diperlukan kolaboratif intensif antara stakeholders (Pemerintah, Swasta dan NGO) melalui program pelestarian budaya dan kearifan lokal yang tanamkan sejak dini di sekolah-sekolah dan komunitas, menyediakan ruang khusus untuk pertunjukan seni budaya dan kuliner lokal yang rutin baik di event-event, hotel, maupun di ruang terbuka umum (*Public Space*). Selain itu diperlukan penguatan dan integrasi *Travel Pattern* Wisata Budaya, *Gastronomy Pattern* dan *Pilgrimage Tourism Destination*.
- 3) **Tata Ruang & Lanskap:** Labuan Bajo, sebagai destinasi pariwisata super prioritas, tengah

menghadapi tantangan tata ruang dan lanskap yang kompleks. Konstruksi berlebih yang tidak memperhatikan kontur alam telah mengubah lanskap alami Labuan Bajo. Pelanggaran batas bangunan di wilayah sempadan pantai dan minimnya akses pantai publik bagi warga lokal semakin memperparah situasi. Kurangnya penerapan arsitektur lokal dalam pembangunan membuat Labuan Bajo kehilangan identitasnya. Keterbatasan transportasi umum dan fasilitas pejalan kaki serta minimnya penggunaan energi terbarukan semakin menyempurnakan gambaran masalah tata ruang dan lanskap yang kompleks di daerah ini. Hal ini diperlukan perencanaan tata ruang yang komprehensif dan berkelanjutan. Perencanaan tersebut harus melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat, hingga akademisi. Rencana tata ruang harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta memperhatikan karakteristik unik dari Labuan Bajo.

4) Rantai Pasok: Pengembangan rantai pasok UMKM parekraf di Labuan Bajo menghadapi tantangan kompleks. Kesenjangan antara penawaran dan permintaan produk, kurangnya komitmen kemitraan, serta hambatan infrastruktur dan akses informasi pasar menjadi kendala utama. Hal ini berdampak pada pertumbuhan UMKM parekraf, menghambat upaya pengembangan ekonomi kreatif di Labuan Bajo. Solusi yang diperlukan:

- Peningkatan kapasitas UMKM: Pelatihan, pendampingan, dan akses teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk.
- Riset pasar: Identifikasi kebutuhan pasar yang lebih baik untuk menyesuaikan produk UMKM.
- Fasilitasi kemitraan: Dukungan pemerintah dan lembaga terkait dalam membangun kemitraan berkelanjutan antara UMKM dan pembeli.
- Pengembangan infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur produksi dan distribusi.
- Akses informasi pasar: Penyediaan informasi pasar yang mudah diakses bagi UMKM.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, rantai pasok UMKM parekraf di Labuan Bajo dapat diperkuat, mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

5) Sampah/Limbah: Labuan Bajo menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah akibat peningkatan volume sampah dan praktik pembuangan yang tidak bertanggung jawab, baik dari aktivitas wisata maupun masyarakat lokal. Hal ini berdampak negatif terhadap lingkungan, ekosistem laut, serta daya tarik pariwisata. Akar masalah terletak pada kurangnya kesadaran. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam meminimalisir dampak tersebut adalah sebagai berikut

- Peningkatan Infrastruktur Persampahan: Penyediaan fasilitas persampahan yang memadai, seperti tong sampah dan tempat pengolahan sampah yang terintegrasi.
- Penegakan Hukum yang Tegas: Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku pembuangan

sampah sembarangan, termasuk wisatawan dan kapal wisata.

- Pendidikan dan Kampanye Lingkungan: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan, sanitasi, higienitas lingkungan melalui pendidikan dan kampanye yang berkelanjutan.
- Keterlibatan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program-program berbasis komunitas.

6) Pesisir dan Kelautan: Perkembangan pariwisata Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas memiliki daya tarik utama sebagai destinasi pariwisata bahari, menghadapi tantangan signifikan terkait infrastruktur dan keselamatan pelayaran. Keterbatasan infrastruktur pelabuhan, penggunaan kapal yang tidak sesuai standar, serta kurangnya kesadaran dan perencanaan keselamatan mengancam keberlanjutan pariwisata dan lingkungan. Kecelakaan laut, kerusakan ekosistem terumbu karang, dan penurunan minat wisatawan menjadi dampak nyata dari permasalahan ini. Peningkatan standar keselamatan, pengelolaan terpadu, dan kolaborasi multi-stakeholder menjadi kunci solusi untuk mewujudkan wisata bahari yang aman dan berkelanjutan di Labuan Bajo.

7) Tata Kelola Destinasi: Tata kelola destinasi unggulan di Labuan Bajo memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan penegakan hukum yang tegas, standarisasi usaha dan pelayanan, serta integrasi dan sinergi antara semua pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti peningkatan jumlah wisatawan, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial, sehingga pariwisata di Labuan Bajo dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.



3.2 Matriks Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Isu	Temuan	Rekomendasi Tindak Lanjut	PIC	Target Waktu
1.	Konservasi dan Keberlanjutan	<i>Over-Capacity</i> di kawasan Taman Nasional Komodo	• Penetapan Daya Dukung Daya Tampung dan <i>LAC</i> Kawasan Konservasi untuk pelestarian ekosistem bawah laut dan terestrial TNK • Penerapan Daya Dukung Daya Tampung untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pariwisata • Sosialisasi kepada semua stakeholder terkait pentingnya penerapan DDDT di kawasan Konservasi	BTNK, BPOL BF, KLHK, KKP	Okt - Des 2024
		Perubahan Iklim akibat Emisi Gas Rumah Kaca, Penggundulan Hutan, Perubahan Pola Curah Hujan, Peningkatan Suhu yang Ekstrem	• Menciptakan Program Wisata Edukasi dan dan mendorong wisatawan berpartisipasi dalam program Konservasi • Penerapan Teknologi Hijau untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan dan sistem pengelolaan limbah yang efisien. • Melaksanakan program restorasi ekosistem untuk memulihkan habitat yang rusak dengan melibatkan semua pihak • Melaksanakan Green & Responsible Tourism merupakan suatu cara untuk menciptakan dan menjaga integritas ekologis, mendukung konservasi alam, dan memberikan manfaat ekonomi yang jangka panjang kepada masyarakat	Seluruh Pihak	2024 - 2025
		Potensi Kerusakan Terumbu Karang akibat aktivitas wisata, jangkar kapal,	• Penempatan Pelampung Jangkar (<i>Mooring Buoy</i>) untuk meminimalkan kerusakan pada terumbu karang dan	Pemda, BTNK, KSOP, Danlanal	2025

		dll	ekosistem laut lainnya. Penempatan juga mempertimbangkan jumlah kapal yang akan berlabuh untuk menghindari <i>overcrowding</i> • Membagi area terumbu karang menjadi zona-zona yang berbeda dengan aturan yang berbeda untuk setiap zona, seperti zona perlindungan penuh, zona pemulihan, dan zona wisata. • Penetapan aturan batas kecepatan saat melakukan perjalanan menuju atau dari destinasi pariwisata untuk mencegah terganggunya ekosistem terumbu karang • Mendukung bisnis wisata yang ramah terumbu karang		
		Masalah SDM dan Kelembagaan dengan Dukungan Anggaran	Kolaborasi berbagai pihak termasuk sektor swasta dan komunitas lokal dalam upaya konservasi melalui inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kemitraan	Seluruh Pihak	2024 - 2025
		Kurangnya Promosi bertema Konservasi dan Keberlanjutan melalui event/ kegiatan, Kegiatan Olahraga ataupun festival/konser di wilayah LBF.	• Menciptakan Program Kolaborasi Promosi Event bersama Industri Kepariwisata Labuan Bajo • Menciptakan Flyer/ Video Promosi Konservasi bersama KL Pusat dan Daerah. • Menginisiasi kegiatan penanaman karang, bersih pantai dan kegiatan bertema konservasi lainnya di wilayah LBF • Sustainable Development & Regenerative Tourism perlu di gaungkan/sosialisasi secara luas di kalangan pelaku wisata maupun wisatawan	Seluruh Pihak	2024 - 2025
2.	Tata Ruang & Lanskap	Konstruksi Berlebih. Di beberapa tempat terjadi pemotongan gunung yang berlebih, pun pembangunan hotel yang menutup	Pemeliharaan Lanskap Asli: Pertahankan keaslian lanskap alam seperti perbukitan, pantai, dan vegetasi alami. Hindari pembangunan yang merusak ekosistem. pembangunan jalan mengikuti kontur perbukitan Labuan Bajo	Pemda,PUPR, KKP, KLHK, BPOL BF	Desember 2024

		pandangan ke arah laut (tidak mengikuti kontur alam)	Salah satu program strategis: Pembangunan Patung di Golomori dan Ketentuan (Lahan Biara SVD)		
		Ditemukan beberapa bangunan yang melanggar peraturan batas area terbangun di wilayah sempadan pantai dan keluhan minimnya akses pantai publik untuk warga lokal	- Penindakan/ penertiban bangunan yang membangun di wilayah sempadan pantai baik di wilayah daratan Labuan Bajo maupun di wilayah kepulauan. - Sosialisasi Hak Masyarakat atas akses terhadap pantai kepada pihak hotel/ pemilik properti dan masyarakat serta penyediaan akses masuk publik menuju pantai-pantai tersebut.	Pemda, BPOL BF	Desember 2024 - 2025
		Minimnya ditemukan corak/ langgam dan warna arsitektur lokal flores dalam pengembangan bangunan/ fasilitas di Labuan Bajo. Model modern membuat orientasi lokasi menjadi bias.	- Arsitektur Lokal: Bangunan baru harus mengadopsi arsitektur lokal yang sesuai dengan karakteristik Labuan Bajo. - Ketinggian Bangunan: Pembatasan ketinggian bangunan untuk menjaga keindahan panorama dan tidak mengganggu pemandangan laut. Pengusulan setinggi pohon munting (15 M)	Pemda, BPOLBF	Desember 2024
		Begitu sulitnya menemukan transportasi umum di Labuan Bajo dan lebih jauh lagi fasilitas pejalan kaki yang telah mulai rusak dan minimnya fasilitas pesepeda.	Transportasi Ramah Lingkungan: Kembangkan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan seperti jalur sepeda, pedestrian, dan transportasi umum.	Pemda, BPOLBF	Desember 2024
		Belum ditemukannya penggunaan energi baru terbarukan. Ditemukan satu panel listrik di Seraya namun tidak	Energi Terbarukan: Gunakan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Penetapan Perda penggunaan minimal	Pemda, BPOLBF	2025

		lagi digunakan.	jumlah energi terbarukan (merujuk pada cetak biru <i>BGCE</i> Indonesia)		
		<i>Over-Tourism</i> di TNK dan minimnya DTW di mainland Labuan Bajo Flores serta sentra pendukung kepariwisataan seperti pertanian, peternakan dan perkebunan.	• Pengembangan Destinasi dan DTW baru di <i>mainland</i> serta promosi terintegrasi bersama paket <i>marine</i> • Pengembangan/ pendampingan Desa Wisata yang berkelanjutan • Pengembangan Sentra Tani, Ternak, Kebun, Hidroponik, Bambu, Aktivasi Geopark di wilayah Flores, Lembata, Alor yang dapat menjadi alternatif rantai pasok pun alternatif DTW bagi wisatawan.	Pemda, BPOLBF	Desember 2024 - 2025
		Perencanaan Pengembangan Kepariwisata dalam dokumen strategis RIPDN yang terbatas di wilayah Taman Nasional Komodo dan Kecamatan Komodo.	Dibutuhkan gerakan bersama Bupati se-Flores, Alor, Lembata dan Pemerintah Provinsi NTT untuk menyuarakan perluasan cakupan RIPDN Labuan Bajo menjadi Labuan Bajo Flores, Alor dan Lembata	Pemda, Pemprov, BPOLBF	2024 - 2025
		Pengelolaan publik toilet dan Fasilitas kesehatan/P3K di daerah wisata yang masih sangat minim.	• Fasilitas Publik toilet yang sudah ada perlu dikoordinasikan kembali terkait pengelolaannya dan siapa yang bertanggung jawab dalam memelihara dan mengurus. • Pengadaan Fasilitas kesehatan/ pertolongan pertama di tiap tempat wisata di perlukan untuk mengatasi keadaan darurat pengunjung saat diperlukan.	Pemda, Pemprov, BTNK, BPOLBF	2024 - 2025
3.	Pesisir dan Kelautan	• Adanya keterlambatan perpindahan penumpang dari pelabuhan ke kapal atau sebaliknya karena lokasi jangkar kapal.	• Penggunaan/ Penambahan Fasilitas Ponton • Meningkatkan fasilitas pelabuhan, seperti pembangunan perbaikan dermaga termasuk Tangga Naik Turun ke Kapal untuk meningkatkan efisiensi operasional.	Pemda, KSOP	2025

	• Fasilitas yang kurang aman seperti tangga di pelabuhan yang sedikit curam • Dermaga di pulau – pulau banyak yang tidak memenuhi syarat keselamatan baik bagi penumpang • kurangnya ketersediaan Fasilitas umum yang dapat digunakan di pulau-pulau sekitar TNK	• Pentingnya ketersediaan standar keamanan dan keselamatan di obyek wisata, harus diperhatikan dalam setiap pengelolanya. • Koordinasi lintas lembaga maupun pemerintah desa terkait kebutuhan akan fasilitas umum di pulau/desa tersebut.		
	• Stabilitas kapal yang didesain untuk angkutan barang tetapi digunakan untuk angkutan penumpang wisata dengan penambahan geladak (<i>deck</i>) pada bagian paling atas kapal • Tingkat kesadaran dari pihak pengelola kapal perlu masih kurang dari segi perlengkapan fasilitas berlayar	• Konstruksi Kapal tidak dimodifikasi namun sesuai dengan standar kapal yang ditentukan. Harus ada kontrol kapal termasuk izin pelayaran • Perlu adanya managing perahu/kapal yang ada di Labuan Bajo termasuk standar kapal (Jenis dan Ukuran) dan kapasitas daya angkut	KSOP, DPMPTSP	2025
	Lokasi <i>diving</i> dan <i>snorkeling</i> belum dipetakan dengan jelas tentang peringatan dan persyaratan dalam aktivitas <i>diving</i> dan <i>snorkeling</i>	Pemetaan Lokasi <i>Diving</i> dan <i>Snorkeling</i> sehingga tidak bertabrakan dengan lalu lintas kapal	BTNK, KSOP, BPOLBF, DISPAR, WWF	2025
	Kurangnya jaminan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan pengunjung serta perlindungan lingkungan di kawasan wisata bahari	Penerapan Cetak Biru penataan Keselamatan (CHSE) pariwisata bahari berstandar internasional	BAPPEDA, BPOLBF, DISPAR, WWF	2025

		Kurangnya pengawasan berkala Pemerintah Daerah terhadap pembangunan dan aktivitas kepariwisataan di wilayah-wilayah kepulauan di dalam TNK pun di luar TNK	• Penjadwalan penelusuran wilayah perairan Labuan Bajo secara berkala bersama Pemda dan stakeholder • Penegakan peraturan daerah tentang pembangunan wilayah pesisir dan izin bangunan di wilayah perairan labuan bajo bekerjasama dengan aparat penegak hukum.	Pemda, BPOLBF, Penegak Hukum	Desember 2024 - 2025
4.	Sosial dan Budaya	Kurangnya pilihan wisata gastronomi lokal (makanan khas) sebagai alternatif wisata di Labuan Bajo	• Advokasi penyusunan Perda Penyelenggaraan dan Perlindungan Ragam Warisan Budaya Sebagai Atraksi Wisata (Adat, Seni, Arsitektur, Kuliner lokal Manggarai) • Dibutuhkan Peraturan Daerah atau konsesi bersama yang mengatur Pengembangan & Penguatan Ambiance, Karakter dan Identitas: a. Kuliner lokal khas, b. Bunga Khas, c. Warna khas untuk Gedung/ Bangunan/ Atap d. Pengaturan kebisingan dan Suara e. Motif kain f. Souvenir/ cinderamata	Dinas Koperindag UMKM, Disparbud Bekraf, BPOLBF Dinas Perdagangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pertanian	2025
		Bangunan-bangunan industri pariwisata tidak mengakomodir ciri khas lokal Manggarai (Flores) dalam langgam arsitektur bangunannya	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Perda Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung terutama terkait dengan Persyaratan Langgam Arsitektur lokal Manggarai terutama pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Bappelitbangda Dinas Tata Ruang DPMPSTSP Disparekrafbud	2025
		Kurangnya ambiens Musik tradisional manggarai (Flores) sebagai cerminan dan identitas budaya.	• Pemerintah Daerah perlu membuat Regulasi terkait penggunaan musik tradisional di Bandara, Hotel, Rumah Makan, Pelabuhan sebagai pengenalan akan budaya manggarai • Penggunaan Musik Tradisional seperti gong dan gendang dalam setiap acara perlu adat wajib digunakan	Penta Helix	2025

			tanpa menggunakan backsound musik agar semakin menunjukkan ciri khas musik tradisional manggarai • Perlu penambahan Sanggar Budaya yang mengangkat ciri khas Budaya Manggarai		
		Belum banyaknya DTW potensial LBF yang masuk kategori <i>Unesco World Heritage Site</i>. Beberapa situs dan Desa wisata LBF memiliki potensi besar dalam mencapai status tersebut.	• Perlunya peningkatan awareness dari semua pemangku kepentingan akan pentingnya suatu desa wisata masuk dalam UWHS dalam meningkatkan industri Pariwisata dan kebudayaan di suatu daerah • Koordinasi dan Kolaborasi dari semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan desa wisata masuk dalam UWHS terutama desa wisata potensial (Todo, Waerebo, Bena dll)	Pemda, BPOLBF, Akademisi dan Media	2025
		Minimnya informasi terkait kuliner khas lokal	• Membuat Narasi tentang menu-menu makanan dan minuman khas lokal • Menetapkan 10 kuliner lokal untuk dipatenkan sebagai kuliner khas tradisional manggarai	Pemda, BPOLBF, Akademisi dan Media	2025
		Kurangnya minat Masyarakat/Wisatawan untuk mengkonsumsi makanan lokal karena teknik pengolahan dan penyajian yang belum memenuhi standar	Membangun kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata (Hotel dan Restoran) untuk membuat standarisasi pengolahan dan penyajian makanan lokal yang melibatkan tim ahli di bidang kuliner (Chef)	Pemda, BPOLBF dan Pelaku Industri Pariwisata	2025
		Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya kegiatan Ritus (Pariwisata yang harus mengikuti Budaya)	• Membangun kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya Ritual Adat dalam Upacara tertentu yang dilaksanakan di manggarai. • Perlu dibentuk Lembaga Adat untuk mengatur segala bentuk ritus adat dalam setiap upacara budaya	Pemda, BPOLBF dan Tokoh Adat	2025

		Belum populernya peta perjalan wisata minat khusus Flores melalui “travel pattern wisata religi katolik LBF”.	• Perlu adanya promosi serta sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat, stakeholder terkait, terutama pelaku industri pariwisata terkait travel pattern religi Katolik, sehingga mereka bisa menjadikan ini sebagai paket perjalanan bagi wisatawan kedepannya. • Serta perlu adanya pemetaan acara ataupun event yang terkait kepada pengunjung ataupun wisatawan dengan mencantumkan destinasi tujuan yang sudah masuk dalam travel pattern Labuan Bajo sehingga semakin banyak dikenal oleh wisatawan maupun pengunjung.	Pokja Wisata Religi dan Tim Komunikasi Publik	10 Agustus 2024
		Belum terintegrasinya penyelenggaraan event antar daerah di LBF.	• Diperlukan adanya kerjasama penyelenggaraan event yang saling mendukung antar kabupaten di wilayah Kabupaten koordinatif BPOLBF agar paket perjalanan wisata yang utuh dan saling mendukung dapat tercipta. • Diperlukan adanya pelatihan penyelenggaraan event dan penyusunan proposal event untuk dukungan penyelenggaraan event daerah.	Pemprov NTT, BPOLBF, Kemenparekraf	27 September 2024
5.	Keselamatan dan Keamanan	Kurangnya kemudahan akses layanan terpadu di Marina Labuan Bajo	Integrasi Pelayanan satu pintu menuju Taman Nasional Komodo melalui Marina Labuan Bajo untuk memperkuat penerapan visitor management yang profesional dengan sarana dan prasarana.	Pemda, KSOP, BTNK, BPOLBF, KLHK, Kemenhub	2025
		Terbatasnya Jumlah SDM dan fasilitas Keselamatan dan Keamanan setempat dikarenakan kelas/ status kantor yang belum memadai.	Peningkatan Status/ Kelas KSOP menjadi Kelas Eselon 2, Peningkatan Kantor Pos Sar Labuan Bajo (Basarnas), Peningkatan status Balai Taman Nasional Komodo menjadi Balai Besar Taman Nasional Komodo dan Perluasan Bandara.	Pemda, KSOP, Basarnas, UPBU Bandara Komodo	2025

Lokasi pelabuhan Labuan Bajo yang sudah padat sehingga membuat akses keluar masuk wisatawan dari kapal terhambat.	Bangun pusat pengendalian pelabuhan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan proses masuk dan keluar kapal maupun wisatawan , serta pemantauan keamanan dan administrasi.	Pemda, KSOP	2025
- Tempat berlabuh jangkar kapal – kapal sudah melampaui kapasitas, sehingga jarak antar kapal rentan terjadinya benturan antar kapal terutama ketika kondisi arus dan angin kencang - Perlunya ada perubahan terhadap kapal – kapal yang tidak beroperasi	Perencanaan perluasan atau peningkatan fasilitas tempat berlabuh dan menerapkan sistem pengaturan waktu berlabuh atau rotasi kapal dapat membantu menghindari penumpukan kapal di satu tempat pada waktu tertentu. 	Pemda,KSOP	2025
Pengisian BBM masih menggunakan jerigen sambil merokok yang membahayakan keselamatan kapal.	- Penggunaan peralatan pengisian BBM Kapal yang sesuai dan aman, seperti pompa bahan bakar dan sistem pipa yang dirancang untuk menghindari kebocoran. - Pelabuhan seharusnya mempunyai fasilitas pengisian BBM / Mini POM	Pemda	2025
Kapal – kapal wisata dan <i>speedboat</i> belum sepenuhnya memiliki asuransi kecelakaan	Penerapan Kewajiban Asuransi Keselamatan	KSOP, Basarnas	2025
Rentetan Kecelakaan Kapal di Wilayah Perairan Labuan Bajo. Terdapat 10 daerah yang rawan kecelakaan kapal yaitu perairan pulau kelor, perairan Batu Tiga,	- Pengecekan dan Sertifikasi: Memastikan semua kapal dan peralatan keselamatan memiliki sertifikasi yang sesuai dan diperiksa secara berkala oleh otoritas terkait. - Menerapkan standar keselamatan internasional, seperti SOLAS (Safety of Life at Sea) dan ISM Code	Danlanal, Basarnas, BMKG, KSOP	2025

		Selat Molo, Pulau Padar, Loho Kima, Pulau Luwu, Pulau Kerangga, Pulau Mauwang, Pulau Tatawa dan Pulau Siaba • Sistem radio pantai yang tidak menjangkau pulau – pulau tujuan wisata	(<i>International Safety Management Code</i>), untuk semua operator kapal dan kegiatan bahari. • Akses informasi keselamatan yang jelas dan mudah diakses, seperti peta bahaya, panduan penggunaan peralatan, dan rambu-rambu keselamatan. • Fasilitas Kapal Ambulance di Pulau - pulau tujuan wisata • Penggunaan teknologi pemantauan seperti Radar, GPS, Radio Pantai dan AIS (Automatic Identification System) untuk melacak kapal dan aktivitas di perairan.		
		• Jumlah personil KSOP Kelas III Labuan Bajo 40 orang dan belum optimal untuk mencakup seluruh wilayah kerja, personil Basarnas Labuan Bajo hanya 7 orang dengan wilayah kerja 4 Kabupaten. • Minimnya fasilitas dan belum adanya jalur evakuasi kecelakaan laut di Labuan Bajo	• Meningkatkan jumlah personil untuk patroli, pengawasan dan penyelamatan di wilayah perairan • Kapal evakuasi yang digunakan dalam mengevakuasi korban harus memiliki standar layak kapal evakuasi dan memiliki peralatan (fasilitas) yang lengkap. • Fasilitas rescue harus dilengkapi dengan tim penanganan medis • Perlu ranger daerah sekitar pantai untuk memberi guides bagi wisatawan terkait keselamatan di pantai (berenang, dsb)	Danlanal, Basarnas, BMKG, KSOP	2025
		Mencegah pelanggaran, memastikan keamanan, dan melindungi kepentingan publik. Beberapa isu yang tengah menjadi perhatian ialah prostitusi, terorisme/ radikalisme, Narkoba dan Pengawasan WNA	• Penerapan sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar aturan keselamatan, termasuk denda atau pencabutan izin operasional. • Perhatian Khusus personil keamanan pada isu: a. Prostitusi, b. Terorisme/ Radikalisme c. Narkoba d. Pengawasan WNA	Pemda	2025
		Belum terdapat <i>Tourist Information</i>	• Membentuk tim Kelompok Kerja (POKJA) dari seluruh	Kemenparekraf	2025

	<i>Center</i> (TIC) yang dapat dipercaya dan diandalkan sebagai media data dan informasi pariwisata DPSP Labuan Bajo. TIC tersebut merepresentasikan seluruh data pariwisata dan DPSP Labuan Bajo.	elemen PENTAHHELIX dalam penyusunan konsep TIC DPSP Labuan Bajo. • Pembaharuan data dilakukan secara berkala pada sistem TIC DPSP Labuan Bajo. • Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada seluruh pihak kepentingan terkait dengan kampanye TIC DPSP Labuan Bajo • Fitur <i>Customer Service</i> (PPID) pada TIC DPSP Labuan Bajo sebagai bentuk tanggapan cepat kepada pihak yang memerlukan data dan informasi tersebut. • TIC DPSP Labuan Bajo kedepannya dapat menjadi referensi dalam penelitian pariwisata (berkelanjutan).	BPOLBF Pemerintah Daerah FORKOPIMDA NGO/LSM Asosiasi Pariwisata (ASITA, ASTINDO, GAHAWISRI, JANGKAR, DOCK, HPI, dan lain-lain)	
	Maraknya kasus penipuan agen/travel di Labuan Bajo	• Perlunya koordinasi lintas sektoral terkait Regulasi pendataan travel agent yang legal beroperasi di kawasan wisata • Sanksi yang jelas dan clear bagi travel agent yang tidak memiliki izin operasi • Pengecekan berkala terhadap semua travel agent yang beroperasi	Kemenparekraf BPOLBF Pemerintah Daerah FORKOPIMDA NGO/LSM Asosiasi Pariwisata (ASITA, ASTINDO, GAHAWISRI, JANGKAR, DOCK, HPI, dan lain-lain)	2025
	• Belum maksimalnya SOP dan penerapan/ implementasi dari SOP yang sudah ada di kawasan Wisata • <i>Signage</i>/ papan interpretasi yang	• Perlu evaluasi terhadap SOP yang suda ada dan Pemahaman dari tiap pelaku wisata terhadap SOP yang diterapkan.	Kemenparekraf BPOLBF Pemerintah Daerah	2025

		belum tersebar merata di destinasi pariwisata	Pengadaaan signage/ papan interpretasi yang dibuat dengan memungkinkan untuk terbaca dengan jelas dari jarak yang wajar, ditempatkan di lokasi- lokasi strategis	FORKOPIMDA NGO/LSM Asosiasi Pariwisata (ASITA, ASTINDO, GAHAWISRI, JANGKAR, DOCK, HPI, dan lain-lain)	
6.	SDM & Kelembagaan	Keterbatasan SDM pada bidang kepariwisataan dan mayoritas SDM Kepariwisata hanya di bagian bottom - middle management.	Pengembangan Labuan Bajo sebagai Centre of Excellence - Percepatan pembangunan Politeknik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Labuan Bajo: Perlu adanya akselerasi proses legalitas lahan, Penerapan Kurikulum yang relevan, Peningkatan Kemitraan Industri dan Program Beasiswa. - Pembangunan Sekolah Marine Tourism Labuan Bajo - Inkubasi/ Penciptaan Champion dan/atau Ahli Marine Tourism Labuan Bajo Flores - Pelibatan Ahli dalam perumusan kebijakan strategis Pariwisata LBF	Sekda, Bappeda, BPOLBF	Oktober 2024 - 2025
		Jenis pelatihan yang masih terlalu sporadis dan kadang tidak tepat sasaran.	- Pelatihan dan sertifikasi bidang digitalisasi: perlu adanya Program pelatihan terintegrasi, sertifikasi kompetensi nasional, asean dan internasional dan Pengembangan platform digital satu pintu. - Diperlukan pelatihan yang masif dan berkelanjutan pada sektor Tenun Ikat/ Motif Labuan Bajo Flores, Pengembangan Musik Lokal, Kerajinan Bambu dan Kopi yang merupakan sektor unggulan Labuan Bajo Flores.	Seluruh Pihak	Okt - Des 2024

	Diperlukan peningkatan tata kelola destinasi dan lembaga independen yang lebih fleksibel yang fokus mengawal pengelolaan kepariwisataan ini.	• Penguatan Forum Tata Kelola Pariwisata Manggarai Barat dan Flores: sebagai manifestasi <i>Destination Management Organization</i>, <i>Destination Governance</i> dan <i>Destination Leadership</i>. • Pembentukan Tim Kerja: Diperlukan tim kerja khusus di Manggarai Barat dalam bentuk Badan/ Lembaga Independen Peduli Taman Nasional Komodo untuk mengadvokasi isu Keberlanjutan di TNK, Labuan Bajo dan sekitarnya. • Penciptaan kembali Forum Koordinasi Desa Wisata LBF sebagai pengembangan yang lebih utuh dan penerapan peer-learning/ teaching yang terbukti lebih feasible untuk pengembangan desa wisata lainnya. • Peningkatan kolaborasi bersama sentra kreatif (musik, drama/ teater, sastra, komoditas pangan, digital dll) dapat mengaktivasi dan menggerakkan riak-riak industri kreatif di daerah. • Kolaborasi bersama pihak swasta, CSR Perusahaan atau pendampingan Hotel/ Agent/ Souvenir Shop atas desa wisata tertentu. • Memajukan kelembagaan desa wisata dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas dari Pokdarwis maupun pengelola Bumdes di desa wisata terkait.	BPOLBF dan Pemda, Pemerintah Desa (Pokdarwis), komunitas kreatif, Pengusaha/ Mitra parekraf	2024 - 2025
	Keterbatasan SDM pada bidang vokasi kepariwisataan dan penunjang kepariwisataan seperti <i>safety security</i> dan yang lainnya.	Peningkatan Kapasitas SDM: Pelaku, Pemandu, Aparatur (<i>Marine inspector</i>, dll), Potensi SAR dari Komunitas/ Asosiasi/ Pelaku/ Balawista melalui koordinasi terpadu (<i>Command Center</i>), modul pelatihan untuk mitigasi, inspeksi, standar pelayanan, Standar CHSE, Usaha Berbasis Risiko, perijinan laik layar, monitoring, penegakan	Seluruh Pihak	2025

			aturan dan ketentuan.		
7.	Sampah/ Limbah	Volume sampah yang terus meningkat dalam Taman Nasional Komodo baik yang merupakan hasil dari aktivitas wisata maupun bawaan dari darat	Penerapan kebijakan <i>zero tolerance</i> untuk aktivitas membuang sampah sembarangan di TN Komodo	Pemda (DLHK), BTN Komodo, KSOP	2025
			• Penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu mulai dari hulu sampai hilir • Aktivasi kegiatan <i>beach clean up day</i> bagi sekolah/hotel/restoran dll, sebagai sarana edukasi serta meningkatkan kesadaran bersama	Pemda (Dinas Lingkungan dan Kehutanan)	2025
		Kapal-kapal yang melakukan aktivitas wisata masih membuang limbah ke laut tanpa ada pengelolaan terlebih dahulu	Pengawasan pelaksanaan kebijakan Zero Limbah di kawasan konservasi di TN Komodo serta penerapan pengolahan limbah terpadu pada kapal-kapal wisata : • Kapal-kapal diwajibkan untuk memiliki penampungan limbah sementara • Limbah-limbah dari kapal akan diolah lebih lanjut di IPAL Labuan Bajo	Pemda (DLHK), KSOP, Dinas Tata Ruang	2025
		Kurangnya fasilitas persampahan misalnya tong sampah, dst	Penyiapan fasilitas persampahan terpadu yang memadai	Pemda (Dinas Lingkungan dan Kehutanan)	2025
		Mentalitas atau budaya menjaga lingkungan dari sampah belum terinternalisasi secara baik dalam pendidikan	Pengintegrasian dan Pelaksanaan Panduan Edukasi Pengurangan Sampah (EPS) pada kurikulum di sekolah-sekolah dengan kerja sama Pemerintah, NGO dan organisasi keagamaan	Pemda (Dinas Lingkungan dan Kehutanan)	2025
		Belum adanya tempat pengolahan	Pembangunan dan Operasionalisasi Fasilitas Pengolahan	Pemda (DLHK),	2025

		sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (BBB) di labuan Bajo Flores	Limbah B3: • Menyediakan fasilitas yang memadai untuk mengolah limbah B3 di Labuan Bajo. • Mencegah pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah B3 yang tidak tepat. Kampanye Edukasi dan Penerapan Sistem Pengelolaan Limbah B3: • Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya limbah B3 dan pentingnya pengelolaan limbah B3 yang baik. • Mendorong masyarakat untuk memilah dan mengolah limbah B3 dengan benar.	KSOP, Dinas Tata Ruang	
8.	Rantai Pasok	UMKM Parekraf belum cukup siap untuk mengikuti <i>matchmaking</i> dengan <i>Demand</i>	• Inventarisasi UMKM dan kebijakan pendukung UMKM • Kurasi produk kesesuaian dengan kebutuhan usaha besar parekraf (Hotel, Restoran, Kawasan Wisata) • Penyusunan <i>E-Catalogue</i> Produk UMKM Parekraf • Peningkatan kapasitas usaha dan pendampingan UMKM Parekraf untuk persiapan <i>matchmaking</i> • Standarisasi Produk melalui program-program yang dikeluarkan oleh dinas terkait seperti PIRT, Halal, BPOM, dll.	Disperindag UMKM, Disparbud Kraf, BPOLBF Dinas Perdagangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pertanian	2025
		Belum adanya komitmen dari <i>demand</i> untuk menerima supply dari UMKM Parekraf floratama	• Inventarisasi usaha besar parekraf (Hotel restoran dll) • Identifikasi kebutuhan usaha parekraf dan persyaratannya (Nama Produk, Kuantitas, Kualitas, Pengiriman, dan Pembayaran) • Komitmen menerima supply dari pelaku parekraf yang terkurasi • Membuat Model Kerjasama yang diharapkan	Disperindag UMKM, Disparekrafbud, BPOLBF Dinas Perdagangan Dinas Ketahanan	2025

		Pangan Dinas Pertanian	
Belum terimplementasikannya kemitraan rantai pasok secara berkelanjutan	• Rencana aksi keberlanjutan rantai pasok • Pengembangan rantai nilai industri parekraf • Pengembangan <i>E-Supply Chain Management</i> (E-SCM) • Peningkatan kapasitas usaha dan pendampingan untuk keberlanjutan rantai pasok • Monev keberlanjutan rantai pasok	Pemda: Disperindag UMKM, Disparekrafbud, BPOLBF	2025
<i>Database</i> industri pariwisata di Labuan Bajo (Hotel, Restaurant, Travel dll)	Pemberian Penghargaan bagi beberapa Hotel & Restaurant di Labuan Bajo yang memiliki program Bapak Asuh atau Pemanfaatan SDM Lokal dalam pengembangan pariwisata . (Green Perundi , Puri Sari, Exotic Komodo, dan Prima Rasa dan Meruorah Komodo. • Green Perundi : Program pencegahan <i>stunting</i> dan aksi penanaman pohon di Manggarai Barat. • Puri Sari : Pembinaan terhadap mahasiswa dan pendampingan dalam LSP • Meruorah : Pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus di SLB utk pelatihan MICE • Exotic Komodo : Pembinaan Penenun dan juga UMKM Lokal dan pendampingan untuk mendapatkan sertifikat PIRT. • Prima Rasa : Pemberdayaan SDM Lokal dalam produksi Madu. • Rumah Produksi Bambu Kab. Manggarai Barat: program pelatihan Kriya yang berbahan dasar bambu.	Pemda: Disperindag UMKM, Disparbudkraf, BPOLBF	2024 - 2025

9.	Infrastruktur	Pembangunan Infrastruktur Pendukung yang belum memadai	• Pembangunan tempat pengelolaan limbah: Membangun fasilitas pengolahan limbah yang modern dan efisien untuk mencegah pencemaran lingkungan. • Pengaturan lalu lintas kapal: Menetapkan zona-zona penyandaran kapal dan mengatur jadwal pelayaran untuk menjaga ketertiban dan keamanan kawasan pesisir. • Pemindahan kapal ro-ro ke Pelabuhan Wae Kelambu: Memindahkan aktivitas bongkar muat kapal ro-ro ke pelabuhan yang lebih sesuai untuk mengurangi kepadatan di kawasan wisata. • Pembangunan pusat penampungan/distributor bahan bakar: Menyediakan fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar yang memadai untuk mendukung operasional transportasi dan aktivitas pariwisata lainnya.	Kemenpar, Kemenhub, Kemen PUPR, Pemda dan Pemprov, Pokdarwis, Pemerintah Desa (Wisata)	2025
		Kurangnya Akses Telekomunikasi yang mumpuni. Akses internet 5G yang temporer dan Internet rumahan yang tidak stabil, ditambah lagi kurangnya akses internet di area publik (Bandara, Marina dan DTW Unggulan)	• Peningkatan kapasitas jaringan: Memperluas jangkauan jaringan seluler dan meningkatkan kecepatan internet di seluruh kawasan Labuan Bajo. • Penyediaan fasilitas Wifi publik: Memasang titik-titik akses Wi-Fi gratis di tempat-tempat umum dan destinasi pariwisata.	Pemda	2025
10	Tata Kelola Kepariwisata	Tata Kelola Destinasi Unggulan di Labuan Bajo Flores yang masih belum dikelola secara utuh dan <i>segmented</i> menciptakan pengalaman	Penguatan Kolaborasi dan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan • Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi: Memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan	Seluruh Stakeholder	2024 - 2025

		wisata yang premium yang tidak utuh. Ambians pariwisata premium tidak didukung oleh pelayanan, infrastruktur dan sistem yang disiapkan seluruh pengelola.	melalui forum-forum diskusi, pelatihan, dan pertemuan rutin. • Penyusunan Rencana Induk Pariwisata yang Komprehensif: Menyusun rencana induk pariwisata yang mencakup semua aspek pengembangan pariwisata, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, hingga promosi yang tidak hanya mencakup Komodo dan labuan Bajo namun seluruh Flores, Alor Lembata. • Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata: TIC Terpadu Kepariwisata Labuan bajo Flores. Pembangunan sistem informasi manajemen pariwisata yang terintegrasi untuk memudahkan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data pariwisata. • Promosi status DTW Labuan Bajo Flores menjadi <i>World Heritage Sites</i> atau <i>Man of Biosphere</i> agar lebih mendapat perhatian lebih untuk pengelolaan yang lebih baik dari dunia internasional.		
		Penegakan hukum terkait permasalahan kepariwisataan yang masih lemah. Banyak ditemukan seperti pelanggaran izin usaha, kerusakan lingkungan, pelanggaran AMDAL dan konflik sosial seringkali sulit ditindaklanjuti secara tegas. Lemahnya penegakan hukum dapat menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang kondusif dan berkelanjutan	Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Penegak Hukum • Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Melakukan pelatihan secara berkala bagi aparat penegak hukum terkait regulasi pariwisata, penanganan kasus lingkungan, dan penyelesaian konflik. • Peningkatan Koordinasi Antar Instansi: Memperkuat koordinasi antara instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan dinas lingkungan hidup, dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum di bidang pariwisata. Koordinasi yang baik akan mempercepat	Seluruh Stakeholder	2024 - 2025

			proses penyelidikan dan penyelesaian kasus. • Peningkatan Alokasi Anggaran: Meningkatkan alokasi anggaran untuk penegakan hukum di bidang pariwisata. • Pembentukan Satuan Tugas Khusus: Membentuk satuan tugas khusus yang bertugas menangani kasus-kasus pelanggaran hukum di bidang pariwisata. Satuan tugas ini dapat terdiri dari perwakilan dari berbagai instansi terkait. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi • Peningkatan Peran Masyarakat: Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pelaporan kasus-kasus pelanggaran hukum di bidang pariwisata. • Peningkatan Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum. Informasi mengenai kasus-kasus yang sedang ditangani, hasil penyelidikan, dan putusan pengadilan harus dipublikasikan secara luas. • Pembentukan Forum Dialog: Membentuk forum dialog antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membahas permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum di bidang pariwisata.		
--	--	--	--	--	--

		Masih belum adanya Standarisasi Usaha dan Pelayanan Kepariwisata yang merata di Labuan Bajo, Flores dan Sekitarnya secara keseluruhan. Hal ini menciptakan perbedaan kualitas produk dan layanan yang berdampak pada menurunnya ekspektasi wisatawan terhadap destinasi super prioritas.	Penguatan Regulasi dan Pengawasan • Penyusunan Standar Pelayanan Minimum: Pemerintah daerah perlu menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimum yang wajib dipenuhi oleh semua pelaku usaha pariwisata, baik itu akomodasi, restoran, transportasi, maupun atraksi wisata. Standar ini harus mencakup aspek kebersihan, sanitasi, higienitas, keamanan, kenyamanan, dan kualitas layanan. • Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Pariwisata: Pemerintah daerah perlu mengeluarkan Perda Pariwisata yang mengatur secara komprehensif segala aspek kegiatan pariwisata, termasuk standarisasi usaha dan pelayanan. Perda ini harus disusun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. • Peningkatan Pengawasan: Melakukan pengawasan secara berkala terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. • Penerapan Sistem Sertifikasi: Memberikan sertifikasi kepada pelaku usaha yang telah memenuhi standar pelayanan minimum seperti CHSE Kemenparekraf. Sertifikasi ini dapat menjadi acuan bagi wisatawan dalam memilih produk dan jasa pariwisata. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha • Pelatihan dan Pemberdayaan: Melaksanakan pelatihan	Kemenpar, Pemda dan Pemprov, Pokdarwis, Pemerintah Desa (Wisata)	
--	--	---	--	---	--

			dan pemberdayaan bagi pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Pelatihan dapat mencakup berbagai aspek, seperti manajemen bisnis, pelayanan pelanggan, dan pengembangan produk wisata. • Fasilitasi Akses Permodalan: Memfasilitasi akses pelaku usaha terhadap permodalan untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan sarana prasarana usaha mereka. • Kemitraan dengan Institusi Pendidikan: Membangun kemitraan dengan institusi pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang pariwisata. Lulusan ini dapat mengisi posisi-posisi strategis di industri pariwisata.		
		Tata Kelola Sumber Daya: • Kurangnya infrastruktur pengolahan limbah, lemahnya pengawasan • Eksploitasi air bersih berlebihan, distribusi air tidak merata • Kurangnya insentif, keterbatasan teknologi dalam penetrasi energi baru terbarukan di LBF • Lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap	• Pembangunan IPAL komunal, penerapan teknologi pengolahan air limbah, edukasi masyarakat • Konservasi sumber mata air, efisiensi penggunaan air, pengembangan sumber air alternatif • Pemberian insentif, pengembangan riset dan inovasi, penyediaan infrastruktur pendukung • Penegakan hukum, restorasi hutan, pengolahan limbah secara terpadu, penerapan standar emisi, edukasi lingkungan • Pengembangan infrastruktur transportasi umum, subsidi transportasi umum, promosi penggunaan transportasi umum	Pihak Swasta/ Bisnis, Kemenpar, Kemen PUPR, Pemda dan Pemprov, LSM, Pokdarwis, Pemerintah Desa (Wisata)	2025

		pengrusakan hutan, polusi udara, air dan suara. • Keterbatasan infrastruktur transportasi umum ramah lingkungan dikarenakan biaya operasional tinggi			
		Pengukuran Kinerja Kepariwisataa: Saat ini pengukuran perkembangan kepariwisataan (termasuk di Labuan Bajo Flores) masih didominasi pengukuran secara ekonomi seperti devisa, pengeluaran wisatawan, lapangan pekerjaan, pendapatan daerah dan sejenisnya). Hal ini mereduksi aspek ekologi-keberlanjutan dan sosial-budaya yang merupakan bagian integral dalam pengembangan kepariwisataan.	Pengukuran kinerja kepariwisataan secara holistik yang mencakup sisi ekonomi, sosial budaya dan ekologi. 	Badan Pusat Statistik, Kemenpar, BI, Akademisi, Pemda, Pemprov, LSM	2025

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Buku Putih (*Policy Statement*) Kepariwisata Labuan Bajo Flores Nusa Tenggara Timur.

Ketua Tim: Pelaksana Tugas Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Dr.Frans Teguh, MA., CHE.

Sekretaris Tim:

- **Tim Manajemen Strategi BPOLBF 2024:** Didimus Estanto Turuk, Kareldus Agas, Elisabeth Uslyeni Rahmawati, Valerianus Riwu, Elisabeth Nainggolan
- **Tim Pariwisata Bahari BPOLBF 2024:** Maria Yulviana D. Bela, Sri Wulan Destriani, Astuti Anggi, Danang P Herlambang, Muh Aryanto Madaria
- **Tim Pariwisata Berkelanjutan BPOLBF 2024:** Handrianus Ligo Tegu Meo, Frederikus Berto Nurdin, Sergius Tantu, Susana Andryani Diyaner, Maria Margareta Dewi Doma

Anggota Tim:

- **Akademisi/ Praktisi:** Dr. Christian Fenie
- **Akademisi/ Praktisi:** Ir. Agus Pambagio, MEM, CPN
- **Perwakilan Industri Pariwisata** (Peserta FGD): GAHAWISRI Manggarai Barat, WWF Labuan Bajo, Jangkar Manggarai Barat, ASKAWI Manggarai Barat, DOCK Manggarai Barat.
- **Perwakilan Masyarakat Lokal** (Peserta FGD): Perwakilan dari kelompok masyarakat
- **Perwakilan Pemerintah Pusat** (Peserta FGD): Balai Taman Nasional Komodo, KSOP Kelas III Labuan Bajo, Pangkalan Angkatan Laut Labuan Bajo, Pos SAR Pencarian dan Pertolongan Labuan Bajo, Stasiun Meteorologi Kelas IV Komodo Manggarai Barat, UPBU Bandara Komodo Labuan Bajo,
- **Perwakilan Pemerintah Daerah** (Peserta FGD): Badan Perencanaan Daerah Manggarai Barat, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Manggarai barat, Dinas Perizinan Satu Pintu Manggarai Barat.

Dukungan Manajemen :

- Konstant Mardinandus Nandus (Direktur Destinasi Pariwisata)
- Raisa Lestari Niloperbowo (Direktur Pemasaran Pariwisata)
- Agung Firmansyah (Direktur Keuangan Umum dan Komunikasi Publik)
- Feri Suprpto (Direktur Industri dan Kelembagaan)





**Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
tahun 2024**